

CALK **SEMESTER II 2024** **(AUDITED)**



Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Pengawasan SDKP Bitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bitung, Januari 2025
Kepala Pangkalan SDKP Bitung



KURNIAWAN, ST, M.SI
001121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	65
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	72
F. Pengungkapan Penting Lainnya	76
VI. Lampiran dan Daftar	90



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

Jln.Tanduruan - Naembundung Kel. Aertembaga II.
Kec. Aertembaga Kota Bitung - Sulawesi Utara
Telp/Fax (0438) 2239156/36797

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pangkalan PSDKP Bitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bitung, Januari 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung

KIIRNAN, ST, M.SI
02001121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pangkalan PSKDP Bitung Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.647.537,00 Sedangkan pada Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50.075.014.397,00 atau mencapai 89,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp55.742.190.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp106.414.051.036,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp382.766.182,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp105.405.022.754,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp626.262.100,00. Nilai Kewajiban jangka pendek Rp674.795.530,00 dan Ekuitas sebesar Rp105.712.923.281,00 Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp105.739.255.506,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.270.573,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar (Rp48.909.161.392,00) sehingga terdapat Defisit



dari Kegiatan Operasional senilai (Rp48.884.890.819,00). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp802.537,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp48.884.088.282,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp104.553.035.267,00. dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp48.884.088.282) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp3.482.839,00) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp50.073.791.360,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp105.739.255.506,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.647.537	0	32.212.887
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.647.537	0	32.212.887
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	15.844.663.000	15.819.874.394	100	13.521.947.115
Belanja Barang	B.4	34.101.630.000	28.490.172.369	84	26.940.720.186
Belanja Modal	B.5	5.795.897.000	5.764.967.634	99	8.005.258.143
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		55.742.190.000	50.075.014.397	90	48.467.925.444

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PANGKALANPENGAWASAN SDKP BITUNG

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	26.464.548	1.845.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Persediaan Yang Belum Diregistrasi	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(132.323)	(9.225)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	356.433.957	345.773.243
Jumlah Aset Lancar		382.766.182	347.609.018
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	40.959.279.625	40.959.279.625
Peralatan dan Mesin	C.15	58.096.968.116	59.005.903.321
Gedung dan Bangunan	C.16	41.788.217.074	38.386.065.774
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	31.141.479.595	31.091.479.595
Aset Tetap yang belum Diregister	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(66.580.921.656)	(65.198.098.214)
Jumlah Aset Tetap		105.405.022.754	104.244.630.101
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	626.262.100	-
Aset Lain-Lain	C.22	3.371.249.739	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(3.371.249.739)	-
Jumlah Aset Lainnya		626.262.100	-
JUMLAH ASET		106.414.051.036	104.592.239.119
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	674.795.530	39.203.852
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		674.795.530	39.203.852
JUMLAH KEWAJIBAN		674.795.530	39.203.852
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	105.739.255.506	104.553.035.267
JUMLAH EKUITAS		105.739.255.506	104.553.035.267
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		106.414.051.036	104.592.239.119

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	24.270.573	-
JUMLAH PENDAPATAN		24.270.573	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	15.838.235.004	13.520.102.115
Beban Persediaan	D.3	524.725.245	773.006.126
Beban Barang dan Jasa	D.4	15.914.780.336	18.502.046.387
Beban Pemeliharaan	D.5	5.506.342.365	3.358.604.876
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.568.668.436	4.447.212.693
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.556.277.683	4.295.143.739
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	132.323	9.225
JUMLAH BEBAN		48.909.161.392	44.896.125.161
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(48.884.890.819)	(44.896.125.161)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		802.537	32.212.887
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		802.537	32.212.887
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(48.884.088.282)	(44.863.912.274)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(48.884.088.282)	(44.863.912.274)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	104.553.035.267	100.797.282.834
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(48.884.088.282)	(44.863.912.274)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.482.839)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3		191.293.941
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(3.492.064)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	9.225	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.7		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	50.073.791.360	48.428.370.766
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.186.220.239	3.755.752.433
EKUITAS AKHIR	E.5	105.739.255.506	104.553.035.267

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berkedudukan di Jalan Naemundung – Aertembaga Dua, Bitung Sulawesi Utara.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Naemundung – Aertembaga Dua, Bitung Sulawesi Utara.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan dan didukung oleh SDM sebanyak 147 orang Pegawai, yang terdiri dari 105 orang Pegawai Negeri Sipil dan 43 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN). Pegawai PNS dan PPNPN pada Pangkalan PSDKP Bitung bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi. Perincian jabatan PNS antara lain sebagai berikut : Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Umum

sebanyak 63 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 40 orang. Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Kepala Pangkalan; Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.01/MEN/KU.611/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/MEN/KU.611/2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pangkalan PSDKP terdapat 1 orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 orang Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan 1 orang Bendahara Pengeluaran.

Pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan periode semester pertama TA 2024 memiliki 2 (unit) Kapal Pengawas antara lain KP Hiu 02 dan KP Hiu 05.

Pendekatan penyusunan a LK

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang ditetapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perubahan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber dana ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah sebagai berikut :

- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan,
 - Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro),
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
 - Pendapatan denda pelaksanaan rekening penerimaan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan dan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2021 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
 - (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah),
 - (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Pengolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun
--	---------

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

*Aset
Lainnya*

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan semester dua telah melaksanakan revisi sebanyak 14 kali terdiri dari :

a) Pagu Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 55.883.290.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2024 dengan kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023.

b) Revisi ke 01

Kegiatan revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan cara revisi pergeseran anggaran, penambahan akun dalam 1 (satu) RO dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasi kegiatan (POK) sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.224/PSDKPlan.5/RC.420/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak mengubah kode DS dari kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023 menjadi kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024.

c) Revisi ke 02

Revisi anggaran *Automatic Adjustment* dalam catatan halaman IVA DIPA dan buka blokir penghapusan tanda blokir dalam halaman IV DIPA. Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran adalah arahan presiden RI dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dipandang perlu dilakukan *Automatic Adjustment* Ditjen PSDKP sebesar Rp 83.004.572.000 dan mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja pada satker lingkup Ditjen PSDKP dengan buka blokir sebesar Rp 2.737.159.000. Sesuai



surat usulan revisi nomor B.48/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 23 Januari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024 menjadi DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024.

d) Revisi ke 03

Revisi anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran antar RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi anggaran adalah untuk memenuhi pengadaan perangkat pengolah data dalam rangka mendukung kegiatan dukungan manajerial pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 sesuai surat usulan revisi nomor B.643/PSDKPLan.5/RC.420/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024 menjadi DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 21 Februari 2024.

e) Revisi ke 04

Revisi pagu anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi sesuai surat usulan revisi anggran B.1604/PSDKPLan.5/RC.420/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dilakukan dalam rangka pemenuhan kegiatan POKMASWAS dan dukungan manajerial tanpa mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini tidak mengubah kode DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 24 April 2024.

f) Revisi ke 05

Revisi anggaran dalam hal pagu berubah dengan cara pergeseran anggaran antar satker pada RO PN, revisi administratif pembukaan blokir, dan revisi tukar *Automatic Adjustment* sesuai surat usulan revisi anggaran B.874/PSDKPLan.5/RC.420/III/2024 tanggal 4 Maret 2024. Pertimbangan dilakukannya revisi adalah:

1. Buka Blokir blokir administratif (kode 2) pada RO

- 2355.EBA.994. Layanan Perkantoran (002 Operasional Perkantoran) sebesar Rp132.220.000 dikarenakan pemeliharaan yang dianggarkan belum tercantum pada RKBMN Tahun 2024 dialihkan menjadi pemeliharaan bangunan pada Satwas dan Wilker SDKP serta pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
2. Pergeseran anggaran antar Sakter Ditjen PSDKP pada RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sebesar Rp1.338.100.000 semula Rp5.472.162.000 menjadi Rp3.909.422.000 untuk mendukung penyelesaian kantor Stasiun PSDKP Belawan;
 3. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun yang mengakibatkan penambahan volume output semula 4 (empat) Unit menjadi 5 (lima) Unit, yaitu Renovasi Mess Perwira; dan
 4. Tukar *Automatic Adjustment* pada RO 2350.QHD.001. Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp213.444.000 sebelumnya pada kegiatan bahan bakar minyak URC dialihkan ke bahan bakar minyak Hiu 05. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 3572-1708-5437-4088 tanggal 24 April 2024 menjadi DS:9526-0813-8772-5203 tanggal 1 Mei 2024.
- g) Revisi ke 06
- Revisi pagu anggaran tetap dengan cara Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) RO, pergeseran anggaran antar KRO, Perubahan RPD Halaman III DIPA, dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasional Kegiatan. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah pemenuhan alokasi anggaran penyambungan instalasi listrik darat kapal pengawas dan pengadaan perlengkapan prediktif speed boat/ rigid inflatable boat/ rubber boat; pelaksanaan Koordinasi Forum TPKP; serta pemutakhiran POK terhadap perubahan detail belanja modal peralatan dan mesin semula pengadaan fasilitas perkantoran (meubelair) menjadi pengadaan

sarana operasional pengawasan (kendaraan dinas) dalam rangka mendukung kegiatan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS:9526-0813-8772-5203 tanggal 1 Mei

2024 menjadi DS:2717-5027-9385-6488 tanggal 31 Mei 2024.

h) Revisi ke 07

Revisi anggaran dalam hal pagu berubah. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan pengurangan alokasi pada RO PN. Revisi dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung pada kegiatan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Morowali dan Renovasi Kantor dan Ruang Pelayanan Pos Pengawasan Satwas SDKP Kendari diusulkan pengurangan alokasi anggaran pada RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sebesar Rp1.238.100.000 semula Rp5.472.162.000 menjadi Rp4.234.062.000. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 2717-5027-9385-6488 tanggal 31 Mei 2024 menjadi DS:3000-6750-4055-5336.

i) Revisi ke 08

Revisi anggaran dalam hal pagu tetap. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD Halaman III DIPA. Revisi dibutuhkan untuk memenuhi alokasi anggaran pembangunan prasarana pengawasan SDKP renovasi pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung dan renovasi bangunan operator Pangkalan PSDKP Bitung serta kegiatan dukungan manajerial dalam rangka mendukung kegiatan tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS tetap, yaitu: 3000-6750- 4055-5336 tanggal 15 Juli 2024.

j) Revisi ke 09

Revisi anggaran dalam hal pagu tetap. Pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antar KRO, penambahan volume

output, dan perubahan RPD halaman III DIPA. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah:

- Pemenuhan alokasi anggaran pengadaan meubelair kantor dan ruang pelayanan publik Pangkalan PSDKP Bitung yang bersumber dari pembangunan pos pengawasan SDKP Kalamo Gorontalo pada RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun;
- Pembayaran kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi pidana pada 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana dengan pemenuhan yang bersumber dari RO 2351.BCE.003 perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif;
- Belanja modal peralatan dan mesin (532111) pengadaan laptop pemetaan ruang laut di wilayah pesisir untuk mendukung olah data informasi geografis ataupun analisis spasial pengawasan ruang laut dan wilayah pesisir dengan pemenuhan yang bersumber dari belanja barang dan belanja perjalanan dinas pada RO 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya;
- Belanja peralatan dinas biasa luar negeri (524211) untuk menghadiri undangan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) pada RO 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya; dan
- Dukungan kegiatan manajerial bersumber dari pergeseran antar KRO pada kegiatan 2355 Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP. Revisi ini mengakibatkan penambahan volume RO 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana semula 7 (tujuh) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara. Revisi ini mengubah kode DS

yaitu DS: 3000-6750-4055-5336 tanggal 15 Juli 2024 menjadi DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 23 September 2024.

k) Revisi ke 10

Revisi pagu anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran dalam satu RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Tujuan revisi adalah untuk pemenuhan alokasi anggaran perawatan darurat speedboat penggantian colladr URC Hiu Biru 05 dan dukungan kegiatan teknis, manajerial serta operasional perkantoran pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 dan revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini tidak mengubah kode DS yaitu DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 15 Oktober 2024.

l) Revisi ke 11

Pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup KKP dalam rangka pemenuhan belanja pegawai, rekomposisi *automatic adjustment* (AA) antar unit eselon I lingkup KKP, tukar AA Pangkalan PSDKP Jakarta, pergeseran anggaran antar RO PN Stasiun PSDKP Kupang, dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan sebelas satker UPT.

Alasan perlunya dilakukan revisi anggaran adalah:

- Pemenuhan belanja pegawai (001) satker Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp1.055.048.000 dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran belanja pegawai antar Eselon I dalam rangka pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan kinerja;
- Rekomposisi *Automatic Adjustment* (AA) antar Unit Eselon I lingkup KKP sebesar Rp40.421.421.000 dalam rangka pemenuhan hari operasi kapal pengawas sebesar Rp35.067.901.000, Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp4.785.520.000, Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif sebesar Rp568.000.000.
- Tukar *Automatic Adjustment* (AA) Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar

Rp216.720.000 dalam rangka perbaikan Kapal Pengawas Hiu 06;

- Pergeseran anggaran antar RO Prioritas Nasional (PN) satker Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp70.180.000 dalam rangka pemenuhan hari operasi kapal pengawas;
- Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker yang mengusulkan revisi anggaran. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 15 Oktober 2024 menjadi DS 1128-0560-7798-2740 tanggal 5 November 2024.

m) Revisi ke 12

Revisi administrasi dengan cara pencantuman catatan halaman IV A DIPA (blokir). Hal ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 dan melakukan pembatasan

belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam halaman IV A DIPA sebagai penghematan.. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 1128-0560-7798-2740 tanggal 5 November 2024 menjadi DS: 6260-6258-7229-6505 tanggal 18 November 2024.

n) Revisi ke 13

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan antar satker UPT lingkup Ditjen PSDKP. Pergeseran anggaran belanja pegawai

(001) antar satker pada kekurangan belanja pegawai Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Bitung memiliki kekurangan belanja pegawai sebesar Rp757.000.000.

Pergeseran antar KRO non PN Pangkalan PSDKP Bitung berupa pergeseran anggaran ke 2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal

sebesar Rp251.000, 2355.EBA.962. Layanan Umum sebesar Rp105.127.000 dan 2355.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar Rp1.442.000 yang bersumber dari 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp251.000, 2355.EBA.956. Layanan BMN sebesar Rp746.000, 2355.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebesar Rp16.800.000, 2355.EBA.963. Layanan Data dan Informasi sebesar Rp8.000.000, 2355.EBB.951. Layanan Sarana Internal sebesar Rp29.000, 2355.EBC.954. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp44.349.000, 2355.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp18.182.000, 2355.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp4.807.000, 2355.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp3.982.000, 2355.EBD.961. Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp8.674.000, 2355.EBD.974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar Rp1.000.000.

Pergeseran antar jenis belanja Pangkalan PSDKP Bitung berupa belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sejumlah Rp36.750.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas sejumlah Rp80.000.000,

dan belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sejumlah Rp6.000.000.

Perubahan volume output pada RO non PN Pangkalan PSDKP Bitung pada 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi semula 8 menjadi 9 unit. 2355.EBA.956 Layanan BMN semula 1 menjadi 4 layanan. Penambahan volume output Pangkalan PSDKP Bitung dengan volume sebanyak 5 perkara dan anggaran sebesar Rp340.000.000. Revisi ini mengubah kode DS yaitu 6260-6258-7229-6505 tanggal 18 November 2024 menjadi DS:

4201-0395-2056-6803 tanggal 11 Desember 2024.

o) Revisi ke 14

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK_ dengan cara pergeseran anggaran dalam satu RO, perubahan akun beserta alokasinya dalam satu RO dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasi Kegiatan (POK). Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan teknis dan sukungan manajerial di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS: 4201-0395-2056-6803 tanggal 17 Desember 2024.

Proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar rincian DIPA :

Uraian	2024	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	15.087.663.000	15.820.059.394
Belanja Barang	33.577.332.000	28.490.172.369
Belanja Modal	7.218.295.000	5.764.967.634
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	55.883.290.000	50.075.199.397

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pangkalan PSDKP bitung terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas

Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

Kegiatan	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)		
		Pagu	Realisasi*	%
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	13.483.410.000	9.065.531.122	67,23
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	2.204.442.000	2.136.596.374	96,92
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	2.420.000.000	2.284.851.534	94,42
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	4.751.550.000	4.416.160.378	92,94
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	700.000.000	650.975.862	93,00
2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	1.831.000.000	1,687.872.571	92,18
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan	197.000.000	187.328.922	95,09

	penangkapan ikan yang merusak			
--	-------------------------------	--	--	--

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Pangkalan PSDKP Bitung dengan pagu mencapai

Kegiatan	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)		
		Pagu	Realisasi*	%
kode	kegiatan	pagu	realisasi	
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	4.234.062.000	4.097.849.682	96,78

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp2.647.537*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.647.537,00 sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2.647.537	-
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah	-	2.647.537	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami

penurunan 91 persen dibandingkan 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.647.537	32.212.887	(92)
Jumlah	2.647.537	32.212.887	(92)

Rincian Pendapatan antara lain :

No	Keterangan	Nilai	No. NTPN	Tanggal
1	Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum Pegawai yg Melaksanakan Tugas Belajar dari April 2023 - Desember 2023 an Semoel Siruru	Rp1.845.000	E9A601JNFV2F20JJ	08/05/24
2	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 unit Sepeda Motor (Risalah Lelang No.109/15.05/2024-01 tgl 21 Maret 2024)	Rp445.000	E8F8E61QV30QR96B	22/03/24
3	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 paket Scrap perahu karet & CCTV (Risalah Lelang No. 90/16.01/2024-1 tgl 08 Maret 2024)	Rp99.960	1957061qv30J1L2V	03/03/24
3	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 paket inventaris kantor (Risalah Lelang no. 2065/15.02/2024-01 tgl 09 Desember 2024)	Rp257.577	A72283CIFKS3QKMD	09/12/24
Total		Rp2.647.537		

Realisasi B.2. Belanja

Belanja
Negara
Rp50.075.01
4.397

Realisasi Belanja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp50.075.014.397,00 atau sebesar 90 persen dari anggarannya senilai Rp55.742.190.000,00. Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat seperti berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	15.844.663.000	15.819.874.394	100
Belanja Barang	34.101.630.000	28.490.172.369	84
Belanja Modal	5.795.897.000	5.764.967.634	99
Total Belanja Kotor	55.742.190.000	50.075.014.397	90
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	55.742.190.000	50.075.014.397	90

Dibandingkan dengan periode TA 2023, Realisasi Belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Pada belanja pegawai dan belanja barang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17 persen dan 6 persen dan belanja modal mengalami penurunan sebesar 28 persen pada tahun sebelumnya.

Sedangkan perbandingan realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	15.819.874.394	13.521.947.115	17
Belanja Barang	28.490.172.369	26.940.720.186	6
Belanja Modal	5.764.967.634	8.005.258.143	(28)
Jumlah	50.075.014.397	48.467.925.444	3

Belanja B.3. Belanja Pegawai

Pegawai
Rp15.819.87
4.394

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.819.874.394,00** dan **Rp13.521.947.115,00** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 17 persen dari 2023 di karenakan penambahan pegawai PPPK 18 Org dan perpindahan jabatan fungsional ke jabatan fungsional kelautan.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.257.573.375	6.745.524.826	8
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	876.656.902	233.378.270	276
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur		385.584.000	(100)
Belanja Vakasi			-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus	7.687.311.547	6.162.128.029	25
Jumlah Belanja Kotor	15.821.541.824	13.526.615.125	17
Pengembalian Belanja Pegawai	1.667.430	4.668.010	(64)
Jumlah Belanja	15.819.874.394	13.521.947.115	17

Rincian pengembalian belanja pegawai Rp1.667.430 per 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Gaji PNS senilai Rp.1.665.000,- dengan rincian :



No	Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nilai
1	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Bulan April 2024 an Moch. Anwar	25/04/2024	1DAE745KPV6S8E5C	185.000
2	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Bulan Maret - April 2024 an Chris Berry Sinambela	29/04/2024	344AF0JUQKTTN3QA	370.000
3	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum Pegawai yg Melaksanakan Tugas Belajar dari April 2023 - Desember 2023 an Semoel Siruru (koreksi Pencatatan)	08/05/2025	E9A601JNFV2F20JJ	185.000
4	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Umum Pegawai yg Melaksanakan Tugas Belajar dari Januari 2024 - Maret 2024 an Semoel Siruru	08/05/2024	0F7706QT9FNC6AHI	555.000
5	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Bulan Maret 2024 (THR) an Chris Berry Sinambela	15/11/2024	81C55522A07H0M9L	185.000
6	Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Bulan Maret 2024 (THR) an Semoel Siruru	15/11/2024	A64D90JUQRBIVMAA	185.000
TOTAL				1.665.000

- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.2.430,- dengan rincian :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Deskripsi	Nilai Pengembalian Belanja Pegawai
1	241791305000454	25-03-2024	00154T/440822/2024	25-03-2024	Kekurangan Gaji Bulan Jan-Feb 2024 untuk 7 pegawai / 18 Jiwa	Rp148
2	241791302000747	25-03-2024	00155T/440822/2024	25-03-2024	Kekurangan Gaji bulan Jan-Feb 2024 untuk 7 pegawai / 17 jiwa	Rp242
3	241791301001607	25-03-2024	00156T/440822/2024	25-03-2024	KEKURANGAN GAJI BULAN JAN-FEB 2024 UNTUK 75 PEGAWAI / 227 JIWA.	Rp974
4	241791301001606	25-03-2024	00157T/440822/2024	25-03-2024	KEKURANGAN GAJI BULAN AGUSTUS 2023 - FEBRUARI 2024 UNTUK 14 PEGAWAI / 49 JIWA.	Rp341
5	241791301001605	25-03-2024	00160T/440822/2024	25-03-2024	KEKURANGAN GAJI BULAN FEB-MAR 2024 UNTUK 5 PEGAWAI / 10 JIWA.	Rp170
6	241791301001609	25-03-2024	00161T/440822/2024	25-03-2024	KEKURANGAN GAJI PPPK BULAN JAN-FEB 2024 UNTUK 13 PEGAWAI / 31 JIWA.	Rp288
7	241791301004670	23-07-2024	00448T/440822/2024	23-07-2024	KEKURANGAN GAJI BULAN JAN-JULI 2024 UNTUK 7 PEGAWAI / 22 JIWA.	Rp190
8	241791302002458	23-07-2024	00450T/440822/2024	23-07-2024	KEKURANGAN GAJI BULAN JAN-JULI 2024 UNTUK 3 PEGAWAI / 4 JIWA.	Rp77
TOTAL						Rp2.430

**Belanja
Barang
Rp28.490.17
2.369**

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp28.490.172.369,00** dan **Rp26.940.720.186,00**. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 6 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan realisasi Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Persediaan dan Belanja Perjalanan dinas.

Rincian realisasi Belanja Barang dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.491.836.622	2.935.579.795	(15)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19			-
Belanja Barang Non Operasional	11.616.936.198	14.331.753.678	(19)
Belanja Barang Persediaan	543.083.174	535.269.167	1
Belanja Jasa	1.771.002.789	1.233.529.645	44
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19			-
Belanja Pemeliharaan	5.498.645.150	3.460.547.708	59
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.521.083.668	4.444.040.193	47
Belanja Perjalanan Luar Negeri	60.903.408	-	100
Jumlah Belanja Kotor	28.503.491.009	26.940.720.186	6
Pengembalian Belanja	13.318.640	-	-
Jumlah Belanja	28.490.172.369	26.940.720.186	6

NO	KAPAL PENGAWAS	REALISASI ANGGARAN BBM KAPAL PENGAWAS DAN HARI OPERASI												
		ANGGARAN (Rp)									HARI OPERASI (HARI)			
		PAGU AWAL	AA TAHAP I	MP PNBPN 54,7 %	REVISI KE 3	PAGU AKHIR	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024	% REALISASI	SISA ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2024	% REALISASI	TARGET AWAL (RM)	TARGET VERSI MP PNBPN	REALISASI	SISA HARI
1	PANGKALAN PSDKP BITUNG	2.132.856.000	213.444.000	4.052.816.730	213.444.000	6.185.672.730	6.175.628.000	99,84%	10.044.730	0,16%	110,00	65,00	65,50	-0,50
	i. KP. HIU 02			4.052.816.730		4.052.816.730	4.049.563.000	99,92%	3.253.730	0,08%	180,00	90,00	71,00	19,00
	ii. KP. HIU 05	2.132.856.000	213.444.000		213.444.000	2.132.856.000	2.126.065.000	99,68%	6.791.000	0,32%	40,00	40,00	60,00	-20,00

Berdasarkan DIPA Petikan SP DIPA- 032.05.2.440822/2024 revisi 14 tanggal 17 Desember 2024, total anggaran Belanja Pangkalan PSDKP Bitung senilai Rp.55.742.190.000,-. Anggaran belanja tersebut dibagi berdasarkan sumber dana yaitu senilai Rp.47.025.321.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan senilai Rp.8.716.969.000,- yang bersumber dari PNBP.

Berdasarkan surat Penetapan Maksimum Pencairan PNBP Tahap I TA 2024 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor S-253/PB.2/2024 tanggal 16 Juli 2024, alokasi maksimum pencairan untuk satker Pangkalan PSDKP Bitung adalah senilai Rp.4.393.334.250,-. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada penambahan alokasi maksimum pencairan untuk satker Pangkalan PSDKP Bitung, sehingga terdapat sisa anggaran PNBP yang tidak dapat direalisasikan senilai Rp.4.323.634.750,-.

Berikut rincian realisasi anggaran Belanja Barang yang bersumber dari PNBP:

URAIAN BELANJA BARANG	Pagu Anggaran PNBP	Realisasi Anggaran PNBP	SISA ANGGARAN PNBP
Bahan Bakar Minyak (1 Unit Kapal) Hiu 02	Rp8.041.239.000	Rp4.053.711.000	Rp3.987.528.000
Pelumas (1 Unit Kapal) Hiu 02	Rp84.253.000	Rp39.490.193	Rp44.762.807
Ongkos Angkut BBM (1 Unit Kapal) Hiu 02	Rp76.583.000	Rp27.153.156	Rp49.429.844
Uang Jaga Sandar KP Hiu 02	Rp50.394.000	Rp48.514.440	Rp1.879.560
Biaya Delegasi KP Hiu 02	Rp464.400.000	Rp224.315.000	Rp240.085.000
TOTAL	Rp8.716.869.000	Rp4.393.183.789	Rp4.323.685.211
Alokasi MP Tahap 1		Rp4.393.334.250	
Sisa anggaran PNBP Sesuai Alokasi MP		Rp150.461	

Terdapat pengembalian belanja barang pada tahun 2024 senilai Rp13.318.640, rinciannya:

- Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Perjalanan dinas SPM 354 NTPN E5E731GCAH8KQ9F3 An. Sutrisno Kumaat Rp 7.200.095,00
- Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Perjalanan dinas SPM 354 NTPN A59E65UFPM4IR9ET An. Maria Indera Rosari Rp 6.118.545,00

- Belanja Barang Operasional pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti belanja operasional penambah daya tahan tubuh Awak Kapal Pengawas dan Pegawai Pangkalan; Belanja BBM Kapal Pengawas; pengiriman surat dinas ke kantor pusat; belanja keperluan kantor; honor operasional Satker (Honor Pejabat Pengelola Anggaran dll); Honor PPNPN; Keperluan kantor seperti Alat Rumah Tangga, Air Minum, Alat Kebersihan, Biaya Jamuan Tamu, Perpanjangan STNK dll dan belanja barang operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Belanja Bahan untuk Uang Makan Awak Kapal Pengawas, konsumsi kegiatan seperti kegiatan penyidikan dll; Uang Makan ABK Non Justicia; Uang Jaga Barang Bukti dan ABK Non Justicia; Honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya.
- Belanja Barang Persediaan pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Persediaan Alat Tulis Kantor, Computer Supply dan belanja barang persediaan lainnya.
- Belanja jasa pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air; Belanja Sewa; Honor Narasumber kegiatan; Ongkos angkut BBM Kapal Pengawas dan Belanja Jasa Lainnya.
- Belanja pemeliharaan pada Pangkalan PSDKP Bitung meliputi :
Pemereliharaan Peralatan dan Mesin, contohnya Perbaikan Darurat dan Rutin Kapal Pengawas, Perbaikan Rutin *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, Genset, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan lain-lain; dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Pangkalan PSDKP Bitung meliputi : Perjalanan Dinas dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; Transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber daya kelautan (SDK) dan Sumber daya perikanan (SDP) diantaranya pengawasan Destuctive Fishing, Pengawasan Ekspor Impor dan pengawasan SDP dan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

Belanja *B.5. Belanja Modal*

Modal
Rp5.764.967
.634

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp5.764.967.634,00** dan **Rp8.005.258.143,00** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 29 persen dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya berkurangnya anggaran Belanja Modal di Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.312.816.334	6.322.752.540	(63)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.402.151.300	1.475.124.603	131
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000.000	207.381.000	(76)
Jumlah Belanja Kotor	5.764.967.634	8.005.258.143	(29)
Pengembalian Belanja Modal		0	-
Jumlah Belanja	5.764.967.634	8.005.258.143	(29)

Belanja *B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp2.312.816.
334

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.312.816.334,00** dan **Rp6.322.752.540,00** Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 63 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan berkurangnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31
Desember 2024 dan 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.312.816.334	6.322.752.540	63
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	2.312.816.334	6.322.752.540	63
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	2.312.816.334	6.322.752.540	63

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

No.	Uraian	No SPM	SP2D	Nilai
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	00147T/440822/2024	241791302000742	Rp 133.750.000,00
2	PENGANDAAN KENDARAAN LAPANGAN POLSUS WP3K	00211T/440822/2024	241791302001081	Rp 323.000.000,00
3	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal (4 Unit Laptop)	00319T/440822/2024	241790301000190	Rp 95.680.000,00
4	Sarana Pengawasan SDK	00327T/440822/2024	241790301000195	Rp 67.525.000,00
5	Pengadaan Perlengkapan URC	00379T/440822/2024	241791301003857	Rp 15.956.250,00
6	Pengadaan Kendaraan Roda 4	00447T/440822/2024	241791302002460	Rp 636.200.000,00
7	Pengadaan Perlengkapan Kapal	00479T/440822/2024	241791303000368	Rp 353.685.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Conference Cam dll	00548T/440822/2024	241791302002976	Rp 32.500.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2	00691T/440822/2024	241791302003727	Rp 37.700.000,00
10	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perkantoran Pangkalan PSDKP Bitung	00693T/440822/2024	241791303000519	Rp 11.988.000,00
11	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan Belanja Modal (1 Unit Tab)	00736T/440822/2024	241791301006990	Rp 9.749.000,00
12	Pengadaan Perlengkapan Kantor Pos Pangkalan PSDKP Bitung	00790T/440822/2024	241791303000602	Rp 85.170.000,00
13	Pengadaan Peralatan perkantoran Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00798T/440822/2024	241791302004314	Rp 60.000.000,00
14	pengadaan untuk Mess Perwira dan Guest house	00834T/440822/2024	241790301000576	Rp 100.415.000,00
15	Pengadaan Laptop 3 Unit	00748T/440822/2024	241791302004006	Rp 56.950.000,00
16	Pengadaan Meubelair Ruang Pelayanan	00965T/440822/2024	241791301008596	Rp 198.579.000,00
17	Pengadaan Tablet 3 unit	00930T/440822/2024	241791303000681	Rp 36.746.550,00
18	Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Perlengkapan Speed Boat	00940T/440822/2024	241791302004941	Rp 28.000.000,00
19	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Pimpinan	00963T/440822/2024	241791301008592	Rp 26.000.000,00
20	Pengadaan Kehumasan	00989T/440822/2024	241790301000800	Rp 3.222.534,00
TOTAL				Rp 2.312.816.334,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp3.402.151.300

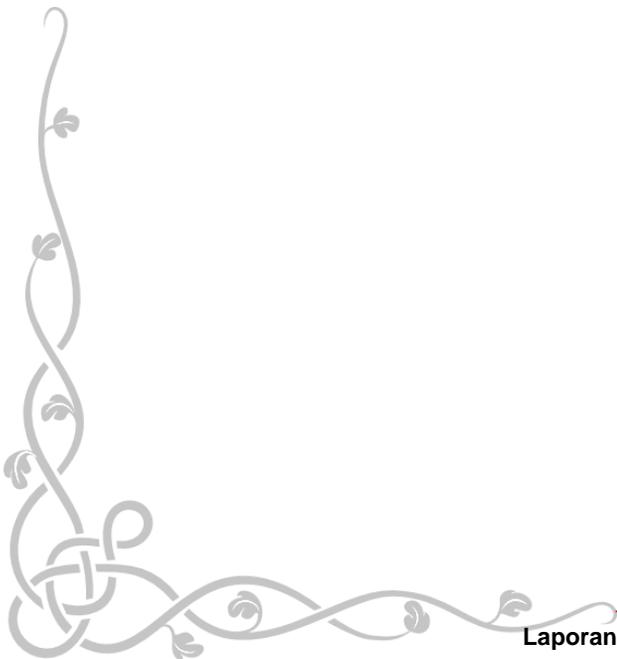
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.402.151.300,00** dan **Rp1.475.124.603,00** Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 88,70 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Karena di tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung terdapat pembangunan Pos Wilker Morowali, Mess Perwira dan Renovasi Kantor Utama yang tercatat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.308.371.300	1.475.124.603	-11,30%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.093.780.000	0	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	3.402.151.300	1.475.124.603	88,70%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	3.402.151.300	1.475.124.603	88,70%

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan antara lain sebagai berikut :



No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (80%)	00326T/4408 22/2024	03/06/24	241790301000194	Rp 44.480.000
2	Perencanaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00326T/4408 22/2024	03/06/24	241790301000194	Rp 76.720.000
3	Pembayaran Uang Muka Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali	00499T/4408 22/2024	13/08/24	241791301005234	Rp 242.730.000
4	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00670T/4408 22/2024	14/10/24	241790301000461	Rp 17.080.000
5	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00670T/4408 22/2024	14/10/24	241790301000461	Rp 16.920.000
6	Pembelian Bahan Baku Pembuatan Pos Pengawasan Kapoposang	00701T/4408 22/2024	18/10/24	241790301000475	Rp 45.000.000
7	Pembayaran Termin I Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali	00780T/4408 22/2024	11/11/24	241791301007342	Rp 283.185.000
8	Pengawasan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00885T/4408 22/2024	10/12/24	241791302004691	Rp 13.042.500
9	Pengawasan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00886T/4408 22/2024	10/12/24	241791302004689	Rp 12.398.700
10	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00969T/4408 22/2024	20/12/24	241791302004990	Rp 70.200.000
11	Ongkos Angkut Bahan Baku Pembuatan Pos Pengawasan Kapoposang	00984T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000767	Rp 35.000.000
12	Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 11.120.000
13	Perencanaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 19.900.000
14	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 4.270.000
15	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 4.230.000
16	Pembayaran Termin II Pekerjaan Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali (SPM Pembayaran RPATA)	00007T/4408 22/2025	06/01/25	259991301003019	Rp 372.995.100
17	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (SPM Pembayaran RPATA)	00008T/4408 22/2025	06/01/25	259991302003517	Rp 39.100.000
Jumlah Belanja					Rp1.308.371.300

Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Pembayaran uang Muka Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00500T/4408 22/2024	13/08/24	241791301005236	Rp 435.000.000
2	Pembayaran Termin I Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00666T/4408 22/2024	11/10/24	241791301006698	Rp 507.500.000
3	Pembayaran Uang Muka Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00668T/4408 22/2024	14/10/24	241791302003674	Rp 59.835.000
4	Pembayaran Uang Muka Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00707T/4408 22/2024	21/10/24	241791302003751	Rp 59.955.000
5	Pembayaran Pekerjaan Peninggian Talud Mess Perwira Pada Pangkalan Bitung	00739T/4408 22/2024	31/10/24	241791302003921	Rp 49.980.000
6	Pembayaran Termin I Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00797T/4408 22/2024	26/11/24	241791302004304	Rp 139.895.000
7	Pembayaran Termin I Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00816T/4408 22/2024	28/11/24	241791302004351	Rp 139.615.000
8	Pembayaran Pekerjaan Gerbang Utama Kantor Pangkalan PSDKP Bitung	00846T/4408 22/2024	05/12/24	241791302004511	Rp 49.500.000
9	Pembayaran Termin II Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00968T/4408 22/2024	23/12/24	241791301008629	Rp 652.500.000
Jumlah Belanja					Rp2.093.780.000

*Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp50.000.00
0*

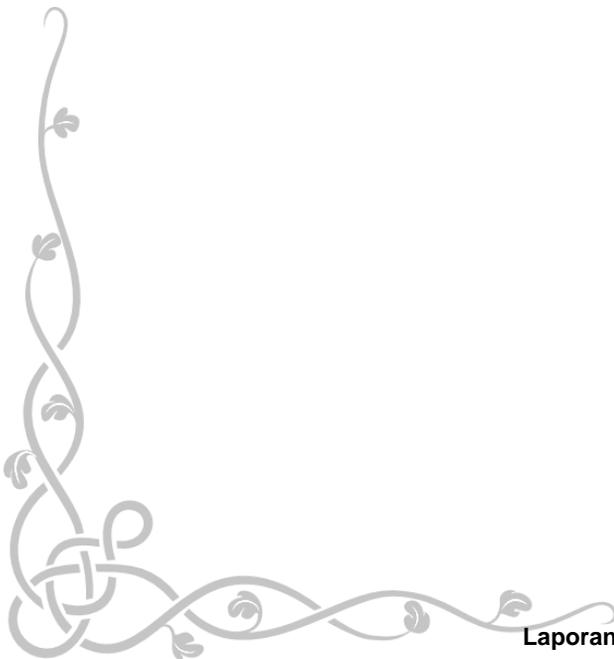
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp50.000.000,00** dan **Rp207.381.000,00** Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 76 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Karena di tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung hanya terdapat Pengadaan Listrik Darat untuk Kapal Pengawas.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31
Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	50.000.000	207.381.000	(76)
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0	-
Jumlah Belanja	50.000.000	207.381.000	(76)

- Pembuatan daya jaringan listrik darat untuk Kapal Pengawas sesuai Kuitansi NO.B.7049/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dengan BAST B.7047/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp 50.000.000,00 dari penyedia Anugerah Abadi Jaya berupa Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA NUP 2



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	2024	2023
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP yang belum di SPM kan	-	-
Saldo TUP	-	-
Jumlah	-	-

Terdapat pengembalian

- Sisa TUP bulan Desember senilai Rp49.631.332,00 telah disetor tanggal 31 Desember 2024 Kode Biling : 702412312062774, kode NTPN: A8EF85UFPRSFVAPM dan kode NTB : 241231039733.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2023 dan 2022

Keterangan	2024	2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang
Bukan Pajak
Rp26.464.54
8,-.*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp26.464.548,00** dan **Rp1.845.000,00**. Piutang bukan pajak adalah hak pemerintah atas uang atau jasa yang sudah diberikan tetapi belum dibayar. Piutang ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	2024	2023
Piutang Lainnya	26.464.548	1.845.000
Jumlah	26.464.548	1.845.000

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 antara lain :

- Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali senilai Rp.24.270.573,00. Pembayaran denda dilakukan dengan pemotongan langsung di SPM Pembayaran RPATA No. 00007T/440822/2025 tanggal 06 Januari 2025, dengan SP2D nomor 259991301003019 tanggal 10 Januari 2025
- Temuan BPK Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat pada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP senilai Rp.2.193.975,00. Kelebihan Pembayaran disetorkan tanggal 24 April 2025 dengan NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-
Piutang
Bukan Pajak
(Rp132.323,-
).*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar (Rp132.323,00) dan (Rp9.225). Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

- Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali senilai Rp.121.353,-;

- Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Temuan BPK Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat senilai Rp.10.970,-.

C.10 Persediaan

Persediaan
Rp356.433.9
57

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp356.433.957,00** dan **Rp345.773.243,00** Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	2024	2023
Barang Konsumsi	125.642.752	107.284.823
Bahan untuk Pemeliharaan	230.791.205	238.488.420
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	356.433.957	345.773.243

Berdasarkan BA Opname Fisik Persediaan nomor

B.7390/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024

sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JUMLA H	SATUAN	NILAI
117111	BARANG KONSUMSI			
1.01.03.01 .001	Alat Tulis	187	Buah	1.121.935
1.01.03.01 .002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	7	Buah	98.000
1.01.03.01 .003	Penjepit Kertas	66	Pack	1.612.150
1.01.03.01 .004	Penghapus/Korektor	36	Buah	188.990
1.01.03.01 .005	Buku Tulis	13	Buah	691.000
1.01.03.01 .006	Ordner Dan Map	167	Buah	5.722.730
1.01.03.01 .008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	Buah	499.540
1.01.03.01 .010	Alat Perekat	109	Buah	2.675.600
1.01.03.01	Staples	14	Buah	1.112.500



.012				
1.01.03.01 .013	Isi Staples	56	Pack	1.074.600
1.01.03.01 .999	Alat Tulis Kantor Lainnya	32	Buah	1.708.100
1.01.03.02 .001	Kertas HVS	373	Rim	29.974.410
1.01.03.02 .002	Berbagai Kertas	244	Buah	1.299.300
1.01.03.02 .003	Kertas Cover	19	Rim	1.553.000
1.01.03.02 .004	Amplop	520	Pack	3.810.050
1.01.03.02 .999	Kertas Dan Cover Lainnya	18	Pack	471.600
1.01.03.03 .002	Tinta Cetak	140	Buah	1.841.600
1.01.03.04 .004	Tinta/Toner Printer	261	Buah	64.937.647
1.01.03.04 .999	Bahan Komputer Lainnya	19	Buah	700.000
10103090 01	Meterai	114	Buah	4.430.000
1.01.03.99 .999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229	Buah	120.000
JUMLAH BARANG KONSUMSI		2.648		125.642.752
117114	SUKU CADANG			
1.01.02.01 .003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	17	Buah	230.791.205
JUMLAH SUKU CADANG		17		230.791.205
TOTAL		2.665		356.433.957

Rincian Persediaan Suku Cadang antara lain begai berikut :

KODE	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI
	KP. Hiu 02	123		123.506.375,00
B.5057/PSDKPL an.5/ PW.380/IX/202 4 tanggal 31 Desember 2024	FILTER CRANKCASE VENTIL M E HIU 02	2	buah	4.695.300
	FUEL FILTER M E HIU 02	2	buah	1.554.000
	FILTER OLI (BY PASS) M E HIU 02	12	buah	15.762.000
	FILTER OLI (FULL FLOW) M E HIU 02	8	buah	10.656.000

	FILTER GEAR BOX M E HIU 02	5	buah	1.554.000
	IMPELLER POMPA AIR LAUT M E HIU 02	1	buah	3.523.020
	FILTER MINYAK A E HIU 02	25	buah	11.496.825
	FILTER OIL A E HIU 02	20	buah	7.215.000
	FILTER UDARA A E HIU 02	6	buah	3.663.000
	Fuel Filter	22	buah	18.820.730
	Racor A E Hiu 2	1	buah	2.886.000
	Filter Udara Turbo A E Hiu 02	6	buah	5.661.000
	Filter Udara Turbo M E Hiu 2	6	buah	33.300.000
	Racor Hiu 02	7	buah	2.719.500
	KP. Hiu 5	169	-	107.284.830,00
7316/PSDKPlan .5/ PW.380/XII/202 4 Tanggal 27 Desember 2024	FILTER OLI (BY PASS) M E HIU 05	5		6.660.000
	FILTER GEAR BOX M E HIU 05	17		5.616.600
	FUEL FILTER M E HIU 05	1		777.000
	COOLANT FILTER M E HIU 05	4		18.736.800
	RACOR M E HIU 05	10		3.885.000
	FILTER UDARA M E HIU 05	6		19.261.830
	FILTER CRANKCASE VENTIL M E HIU 05	2		4.695.300
	IMPELLER POMPA AIR LAUT M E HIU 05	4		23.620.800
	FILTER OIL A E HIU 05	12		3.330.000
	FUEL FILTER A E HIU 05	12		2.664.000
	RACOR A E HIU 05	22		7.326.000
	AIR FILTER A E HIU 05	14		7.381.500
	WATER COOLER	60		3.330.000

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2023	345.773.243
Mutasi tambah:	
Pembelian Persediaan Barang Konsumsi	544.514.174
Pembelian Persediaan Suku Cadang	682.006.948
Mutasi kurang:	
Pemakaian Persediaan Barang Konsumsi	(526.156.245)
Pemakaian Persediaan Suku Cadang	-689.704.163
Saldo per 31 Desember 2024	356.433.957

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024 (GLP)

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2023	345.773.243
Realisasi Belanja 521811 31 Des 2024	543.083.174
Realisasi Belanja 523123 31 Des 2024	682.006.948
TOTAL REALISASI BELANJA PERSEDIAAN 2024	1.225.090.122
SALDO AWAL + REALISASI PERSEDIAAN	1.570.863.365
Beban Persediaan Konsumsi (LO)	524.725.245
Beban Persediaan Suku Cadang (LO)	689.704.163
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN 2024	1.214.429.408
Selisih	356.433.957
Neraca Per 31 Desember 2024	356.433.957
SELISIH	0

Tanah

C.14 Tanah

Rp40.959.279.625

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp40.959.279.625 dan Rp40.959.279.625. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	40.959.279.625
Mutasi tambah:	
Tranfer Masuk	
Selisih revaluasi aset	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	40.959.279.625

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

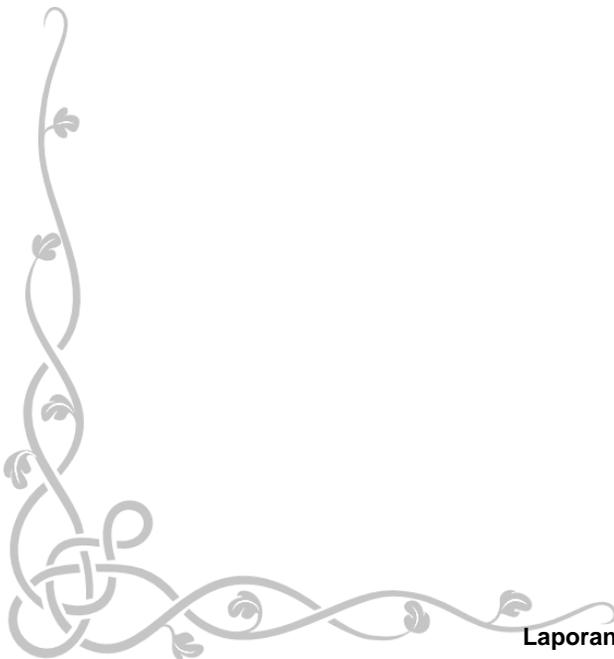
No	Luas	Lokasi	Nilai
1	45.750 m2	Kab. Minahasa Utara	15.530.798.000
2	40.300 m2	Kota Bitung	18.397.399.000
3	4.980 m2	Kota Kendari	3.791.959.000
4	979 m2	Gorontalo	425.043.000
5	1.198 m2	Kab. Gorontalo Utara	317.534.000
6	467 m2	Kab. Minahasa Utara	95.370.000
7	609 m2	Kab. Takalar	745.573.000
8	218 m2	Kab. Mamuju	488.648.000
9	512 m2	Kab. Minahasa Tenggara	290.519.000
10	337 m2	Kota Bau-Bau	312.122.000
11	630 m2	Kab. Kepulauan Selayar	395.741.000
12	399 m2	Kab. Banggai	5.000.000
13	620 m2	Kab. Banggai Laut	13.500.000
14	1.797 m2	Kab. Buton	14.854.425
15	1.216 m2	Kab. Morowali	135.219.200

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan baik luas maupun nilai tanah.

*Nilai Buku
Peralatan
dan Mesin
Rp58.096.96
8.116*

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp58.096.968.116,00** dan **Rp59.005.903.321,00**. Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan 2023	59.005.903.321
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.311.586.600
Pengembangan Nilai Aset	
Reklasifikasi Masuk	230.296.000
Reklasifikasi Keluar	(230.296.000)
Koreksi Pencatatan nilai Bertambah	1.229.734
Transfer Masuk	159.396.000
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3.371.249.739)
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	
Koreksi pencatatan nilai	
Transfer Keluar	(9.897.800)
Saldo per 31 Desember 2024	58.096.968.116
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-47.879.310.030
Nilai Buku per 31 Desember 2024	10.217.658.086

Mutasi Penambahan nilai dari Pembelian Peralatan dan mesin senilai Rp.2.311.586.600 antara lain sebagai berikut :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data melalui SPM No.147 tanggal 22 Maret 2024 dan SP2D No. 241791302000742 senilai Rp.133.750.000,- dengan rincian 8 Unit Laptop;
- Pengadaan Kendaraan Lapangan Polsus WP3K berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 melalui SPM No.211 tanggal 17 April 2024 dan SP2D No. 241791302001081 senilai Rp.323.000.000,-.
- Pengadaan Sarana Pengawasan SDK berupa 4 Unit Laptop melalui SPM No.319 tanggal 30 Mei 2024 dan SP2D No. 241790301000190 senilai Rp.95.680.000,-;
- Pengadaan Sarana Pengawasan SDK melalui SPM No.327 tanggal 03 Juni 2024 dan SP2D No. 241790301000195 senilai Rp.67.525.000,- dengan rincian barang antara lain : 1 Unit GPS senilai Rp.12.450.000,-, 1 Unit Laptop senilai Rp.19.100.000,-, 1 Unit Action Cam senilai Rp.9.700.000,-,

1 Unit Kamera Udara senilai Rp.26.275.000,-;

- Pengadaan Perlengkapan URC melalui SPM No.379 tanggal 19 Juni 2024 dan SP2D No. 241791301003857 senilai Rp.15.956.250,- dengan rincian barang antara lain : 1 Unit Genset senilai Rp.8.325.000,-, 1 Unit AC Split senilai Rp.5.550.000,-, 1 set peralatan dapur senilai Rp.2.081.250,-;
- Pengadaan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit melalui SPM No.447 tanggal 22 Juli 2024 dan SP2D No. 241791302002460 senilai Rp.636.200.000,-.
- Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas sesuai melalui SPM Nomor 479 dan SP2D 241791303000368 Tanggal 6 Agustus 2024 senilai Rp.353.685.000, antara lain:

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	3030212016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	1 unit	Rp2.650.000
2	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1 unit	Rp16.900.000
3	3050104001	Lemari Besi/Metal	2 unit	Rp9.860.000
4	3050206072	Lampu	2 unit	Rp31.000.000
5	3060105038	GPS Receiver	1 unit	Rp20.150.00
6	3050204006	Kipas Angin	2 unit	Rp2.760.000
7	3050204001	Lemari Es	1 unit	Rp5.800.000
8	3010313011	Pelampung Life Jacket	12 unit	Rp29.520.000
9	3050206013	Megaphone	1 unit	Rp1.500.000
10	3050203004	Mesin Cuci	2 unit	Rp8.800.000
11	3010312003	Pompa Portable	1 unit	Rp4.550.000
12	3050206007	Loudspeaker	1 unit	Rp4.825.000
13	3010305010	Pompa Air	1 unit	Rp3.570.000
14	3050206001	Radio	1 unit	Rp29.500.000
15	3010312003	Pompa Portable	2 unit	Rp9.760.000
16	3060203999	Alat Komunikasi Radio	1 unit	Rp23.600.000

		HF/FM Lainnya		
17	3070101162	Senter	1 unit	Rp11.650.000
18	3080110065	Torsimeter	1 unit	Rp3.710.000
19	3060101005	Audio Amplifier	1 unit	Rp1.550.000
20	3100102002	Lap Top	1 unit	Rp33.600.000
21	3050204004	A.C. Split	3 unit	Rp15.000.000
22	3050204004	A.C. Split	5 unit	Rp22.750.000
23	3100102002	Lap Top	2 unit	Rp37.200.000
24	3010303002	Portable Compressor	1 unit	Rp2.380.000
25	3060101048	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	2 unit	Rp21.100.000
TOTAL				Rp353.685.000

- Pengadaan Conference Cam dll melalui SPM No.548 tanggal 28 Agustus 2024 dan SP2D No. 241791302002976 senilai Rp.32.500.000,- dengan rincian barang antara lain : 2 Unit Laptop senilai Rp.14.300.000,-, 1 Unit Video Conference senilai Rp.18.200.000;
- Pengadaan Kendaraan Roda 2 sebanyak 1 unit melalui SPM No.691 tanggal 17 Oktober 2024 dan SP2D No. 241791302003727 senilai Rp.37.700.000,-;
- Pengadaan Peralatan Perkantoran Pangkalan PSDKP Bitung berupa AC Split sebanyak 2 unit melalui SPM No.693 tanggal 17 Oktober 2024 dan SP2D No. 241791303000519 senilai Rp.11.988.000,-;
- Pembelian Tablet PC sebanyak 1 unit melalui SPM No.736 tanggal 29 Oktober 2024 dan SP2D No. 241791301006990 senilai Rp.9.749.000,-;
- Pengadaan Perlengkapan Kantor Pos Pangkalan PSDKP Bitung melalui SPM No.790 tanggal 18 November 2024 dan SP2D No. 241791303000602 senilai Rp.85.170.000,- dengan rincian barang antara lain : 2 Unit Loudspeaker senilai Rp.7.750.000,-, 3 Unit mesin Pemotong Rumput senilai Rp.10.620.000,-, 1 Unit tangga senilai Rp.5.600.000,-, 4 Unit AC Portable senilai Rp.61.200.000,-;
- Pengadaan Peralatan perkantoran Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung melalui SPM No.798 tanggal 26 November 2024 dan SP2D No.



241791302004314 senilai Rp.60.000.000 dengan rincian barang antara lain : 2 Unit Printer senilai Rp.34.000.000,- dan 1 Unit Tablet PC senilai Rp.26.000.000,-;

- Pengadaan untuk Mess Perwira dan Guest house melalui SPM No.834 tanggal 04 Desember 2024 dan SP2D No. 241790301000576 senilai Rp.100.415.000,- dengan rincian barang antara lain : 3 unit Kasur senilai Rp.34.041.480,-, 2 unit tempat tidur kayu senilai Rp. 66.373.520,-;
- Pengadaan laptop pemetaan ruang laut di wilayah pesisir pada Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 3 unit melalui SPM No.748 tanggal 05 November 2024 dan SP2D No. 241791302004006 senilai Rp.56.950.000,-;
- Pengadaan Meubelair Ruang Pelayanan Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung melalui SPM No. 965 tanggal 19 Desember 2024 dan SP2D 241791301008596 dari Penyedia Adilludin Abdun, berupa:

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Meja Kerja Kayu	10 buah	42.180.000
2	Meja Kerja Kayu	5 buah	41.070.000
3	Meja Rapat	2 buah	36.408.000
4	Sofa	2 set	25.530.000
5	Sofa	2 set	22.200.000
6	Meja Penunjang Kantor	2 buah	15.984.000
7	Meja Penunjang Kantor	1 buah	15.207.000
	Total	24	198.579.000

- Pengadaan tablet PC pada Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 3 Unit melalui SPM No.930 tanggal 17 Desember 2024 dan SP2D No. 241791303000681 senilai Rp.36.746.550,-;
- Pengadaan perlengkapan Speedboat albacore melalui SPM No.940 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D No. 241791302004941 senilai Rp.28.000.000,- dengan rincian barang antara lain : 1 Unit Genset senilai Rp.20.535.000,-, 1 Unit Pompa Portable senilai Rp.4.357.000,-, 1 Unit Selang Air senilai Rp.3.108.000,-;
- Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Pimpinan melalui SPM No.963 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D No. 241791301008592 senilai

Rp.26.000.000,- dengan rincian barang antara lain : 1 Unit Sofa senilai Rp.11.100.000,-, 1 Unit Meja Kerja Kayu senilai Rp.,7.993.580,-, 6 Unit Kursi Besi senilai Rp.6.906.420,-;

- Pengadaan alat kehumasan melalui SPM No.989 tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D No. 241790301000800 senilai Rp.1.992.800 berupa 1 unit layer backdrop.

Mutasi Penambahan nilai dari Reklasifikasi Masuk Peralatan dan mesin senilai Rp.230.296.000 antara lain sebagai berikut :

- Transaksi Reklasifikasi Masuk berdasarkan Surat Keterangan Nomor B. 5787 /PSDKPLan.5/ KP.120 /X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 senilai Rp. 230.296.000 berupa Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus yang merupakan perahu karet KP. Hiu 02 NUP 1 dan KP. Hiu 05 NUP 5 menjadi Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang lainnya KP. Hiu 02 NUP 1 dan KP. Hiu 05 NUP 2.

Mutasi Penambahan nilai dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp.1.229.734,- antara lain sebagai berikut :

- Koreksi Pencatatan Pembelian Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi melalui Pengadaan alat kehumasan melalui SPM No.989 tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D No. 241790301000800 senilai Rp.1.229.734 berupa 1 unit Tas Kamera senilai Rp.697.434 dan 1 Unit Lampu Blitz Kamera senilai Rp.532.300,-. Koreksi Pencatatan berdasarkan surat No.B.7355/PSDKPLan.5/KP.120/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024

Mutasi Penambahan nilai dari Transfer Masuk senilai Rp.159.396.000,- antara lain sebagai berikut :

- Transfer masuk sejumlah 1 unit dari Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen. PSDKP berdasarkan nomor B.682/PSDKP.1/PL.450/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 berupa Mini Bus merk Escudo NUP 8 senilai Rp. 148.000.000.
- Transfer Masuk dari Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST nomor B.1690/PSDKPSta.6/PL.930/X/2024 berupa Laptop Merk Acer sejumlah 1 unit NUP 3 senilai Rp.11.396.000

Mutasi Pengurangan nilai dari Reklasifikasi Keluar Peralatan dan mesin senilai Rp.230.296.000 antara lain sebagai berikut :

- Transaksi Reklasifikasi Keluar berdasarkan Surat Keterangan Nomor B. 5787 /PSDKPLan.5/ KP.120 /X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 senilai Rp. 230.296.000 berupa Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus yang merupakan perahu karet KP. Hiu 02 NUP 1 dan KP. Hiu 05 NUP 5 menjadi Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang lainnya KP. Hiu 02 NUP 1 dan KP. Hiu 05 NUP 2.

Mutasi Pengurangan nilai Peralatan dan mesin dari Penghentian Aset dari Penggunaannya senilai Rp.3.371.249.739 antara lain sebagai berikut :

- Terdapat Penghentian Aset dari Penggunaan berdasarkan surat keterangan nomor B.4023/PSDKPLan.5/PL.450/VII I/2024 tanggal 20 Agustus 2024 berupa:

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Nilai
1	Alat Besar	5	Rp.19.285.000
2	Alat Pertanian	4	Rp.2.881.000
3	Alat kantor dan Rumah Tangga	294	Rp.1.127.084.995
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	121	Rp.514.925.060
5	Alat Laboratorium	1	Rp.7.000.000
6	Alat Persenjataan	4	Rp.1.400.000
7	Komputer	241	Rp.1.576.111.684
8	Alat Eksplorasi	3	Rp.11.572.000
9	Alat Keselamatan Kerja	4	Rp.72.800.000
10	Alat Proses Produksi	2	Rp.14.440.000
11	Peralatan Olahraga	3	Rp.23.750.000
TOTAL		682	Rp.3.371.249.739

Mutasi Pengurangan nilai Peralatan dan mesin dari Transfer Keluar senilai Rp.9.897.800 antara lain sebagai berikut :

- Transfer keluar ke Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST Nomor B.5788/PSDKPLan.5/PL.450/X/2024 berupa Laptop sejumlah 1 unit

NUP 104 Merk HP senilai Rp. 9.897.800.

Nilai Buku C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah **Rp41.788.217.074,00** dan **Rp38.386.065.774,00** Mutasi transaksi terhadap **Rp41.788.217.074** Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	38.386.065.774
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.073.610.100
Pembelian	99.480.000
Pengembangan Melalui KDP	2.229.061.200
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	344.571.500
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 desember 2024	41.788.217.074
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(5.964.262.270)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	35.823.954.804

Penjelasan mutasi tambah gedung dan bangunan periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Penyelesaian pembangunan dengan KDP senilai Rp.1.073.610.100 dengan rincian:
 - Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali sesuai Kontrak B.3363/PSDKPLan.5/ PL.430/VII/2024, Jaminan Pemeliharaan PT Bank Rakyat Indonesia Nomor 0021824120029350 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp. 993.610.100,- dengan rincian :

No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (80%)	00326T/4408 22/2024	03/06/24	241790301000194	Rp 44.480.000
2	Pembayaran Uang Muka Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali	00499T/4408 22/2024	13/08/24	241791301005234	Rp 242.730.000
3	Pembayaran Termin I Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali	00780T/4408 22/2024	11/11/24	241791301007342	Rp 283.185.000
4	Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 11.120.000
5	Pembayaran Termin II Pekerjaan Konstruksi Pos Pengawasan SDKP Morowali (SPM Pembayaran RPATA)	00007T/4408 22/2025	06/01/25	259991301003019	Rp 372.995.100
6	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali (SPM Pembayaran RPATA)	00008T/4408 22/2025	06/01/25	259991302003517	Rp 39.100.000
Jumlah Belanja					Rp 993.610.100

- Pekerjaan Pos Kapoposon Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang senilai Rp. 80.000.000 dengan rincian :
 - o Pembelian bahan baku Pos Kapoposang senilai Rp.45.000.000,- melalui SPM No.701 tanggal 18 Oktober 2024 dan SP2D No 241790301000475;
 - o Ongkos Kirim Bahan Baku Pos Kapoposang senilai Rp.35.000.000,- melalui SPM no.984 tanggal 31 Desember 2024 dan SP2D No. 241790301000767.
- Pembelian senilai Rp.99.480.000,- dengan rincian:
 - Pekerjaan Peninggian Talud Mess Perwira Pada Pangkalan Bitung senilai Rp.49.980.000,- melalui SPM No.739 tanggal 31 Oktober 2024 dan SP2D No. 241791302003921;
 - Pekerjaan Pagar Gerbang Pangkalan PSDKP Bitung senilai Rp.49.500.000,- melalui SPM No.834 tanggal 04 Desember 2024 dan SP2D No. 241790301000576.
- Pengembangan melalui KDP senilai Rp.2.229.061.200,- dengan rincian :
 - Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung sesuai kontrak No. B.3368/PSDKPlan.5/PL.430/VII/2024 Tanggal 18 Juli

2024; Jaminan Pemeliharaan NO.0034324120028348 Tanggal 20 Desember 2024; senilai Rp. 1.761.820.000 dengan rincian :

No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Perencanaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00326T/4408 22/2024	03/06/24	241790301000194	Rp 76.720.000
2	Pembayaran uang Muka Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00500T/4408 22/2024	13/08/24	241791301005236	Rp 435.000.000
3	Pembayaran Termin I Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00666T/4408 22/2024	11/10/24	241791301006698	Rp 507.500.000
4	Pembayaran Termin II Konstruksi Renovasi Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00968T/4408 22/2024	23/12/24	241791301008629	Rp 652.500.000
5	Perencanaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 19.900.000
6	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	00969T/4408 22/2024	20/12/24	241791302004990	Rp 70.200.000
Jumlah Belanja					Rp1.761.820.000

- Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung sesuai Kontrak no.B.5162/PSDKPlan.5/PL.430/ X/2024 tgl 4 Okt 2024; senilai Rp. 234.242.500, dengan rincian :

No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00670T/4408 22/2024	14/10/24	241790301000461	Rp 17.080.000
2	Pembayaran Uang Muka Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00707T/4408 22/2024	21/10/24	241791302003751	Rp 59.955.000
3	Pembayaran Termin I Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00797T/4408 22/2024	26/11/24	241791302004304	Rp 139.895.000
4	Pengawasan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	00885T/4408 22/2024	10/12/24	241791302004691	Rp 13.042.500
5	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 4.270.000
Jumlah Belanja					Rp 234.242.500

- Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung sesuai Kontrak no.B.5163/PSDKPlan.5/PL.430/ X/2024 tgl 4 Okt 2024;) senilai Rp. 232.998.700 dengan rincian :

No.	Uraian	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Nilai
1	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung (80%)	00670T/4408 22/2024	14/10/24	241790301000461	Rp 16.920.000
2	Pembayaran Uang Muka Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00668T/4408 22/2024	14/10/24	241791302003674	Rp 59.835.000
3	Pembayaran Termin I Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00816T/4408 22/2024	28/11/24	241791302004351	Rp 139.615.000
4	Pengawasan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	00886T/4408 22/2024	10/12/24	241791302004689	Rp 12.398.700
5	Perencanaan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung (20%)	00981T/4408 22/2024	31/12/24	241790301000762	Rp 4.230.000
Jumlah Belanja					Rp 232.998.700

Penjelasan mutasi kurang gedung dan bangunan periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Nomor B.7392/PSDKP.Lan.5/PL.760/ XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 berupa Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen 1 senilai Rp. 344.571.500 asset Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen NUP 1 yang berjumlah 2 aset, sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan Nilai Berkurang dan mencatat nup baru pada Saldo Awal asset.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp31.141.479.595,00** dan **Rp31.091.479.595,00**

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp31,141,479,595

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	31.091.479.595
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset	50.000.000
Pengembangan Langsung	
Mutasi kurang:	
Usulan barang rusak berat	
Saldo per 31 Desember 2024	31.141.479.595
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(10.534.388.406)
Nilai Buku per Desember 2024	20.607.091.189

Penjelasan mutasi tambah Jaringan periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Pembuatan daya jaringan listrik darat untuk Kapal Pengawas melalui SPM No.939 tanggal 18 Desember 2024 dan SP2D No. 241791302004948 senilai Rp.50.000.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Nilai Buku
Aset Tetap
Lainnya Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah **Rp0 dan Rp0**. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi Tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-

Nilai Buku C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.
Pengerjaan
Rp0

Nilai Buku C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023
Penyusutan adalah masing-masing (Rp66.580.921.656,00) dan (Rp65.198.098.214).
Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai
(Rp66.580.9 suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
21.656) bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah
 sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	58.096.968.116	49.066.072.749	9.030.895.367
2	Gedung dan Bangunan	41.788.217.074	6.408.647.518	35.379.569.556
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.141.479.595	11.106.201.389	20.035.278.206
4	Aset Tetap Lainnya	0		0
Akumulasi Penyusutan		131.026.664.785	66.580.921.656	64.445.743.129

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp626.262.100

C.21 Dana yang dibatasi penggunaannya

Terdapat dana yang dibatasi penggunaannya yang berasal dari Pembayaran Pekerjaan yang diserahterimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d tanggal 31 Desember 2024. Pengusulannya menggunakan SPM RPATA. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya senilai Rp.626.262.100,-. Transaksi yang menggunakan SPM RPATA antara lain :

- Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali senilai Rp.372.995.100,-. SPM Penampungan RPATA nomor 970 tanggal 24 Desember 2024 senilai Rp.372.995.100,-. SPM Pembayaran RPATA

nomor 07 tanggal 06 Januari 2025 senilai Rp.372.995.100,-.BAST nomor B.7304/PSDKPLan.5/PL.450/XII.2024 tanggal 27 Desember 2024

- Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali senilai Rp.39.100.000,-. SPM Penampungan RPATA nomor 971 tanggal 24 Desember 2024 senilai Rp.39.100.000,-. SPM Pembayaran RPATA nomor 08 tanggal 06 Januari 2025 senilai Rp.39.100.000,-. BAST Nomor B.7308/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024
- Pembayaran Belanja BBM Kapal Pengawas senilai Rp.214.167.000,-. SPM RPATA Penampungan RPATA Nomor 972 tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp.214.167.000,-. SPM Pembayaran RPATA nomor 06 tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp.207.376.000,- dengan BAST Nomor B.7308/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27-12-2024. SPM Penihilan RPATA nomor 09 tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp.6.791.000,-

Aset Lain-lain

Rp3.371.249.739

C.22 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar **Rp3.371.249.739,00** dan **Rp0**. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Pangkalan PSDKP Bitung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Pangkalan PSDKP Bitung Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	3.371.249.739	3.143.000	3.374.392.739
TOTAL	3.371.249.739	3.143.000	3.374.392.739

Penjelasan mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya *Peralatan dan Mesin* Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Penghentian Aset dari Penggunaan telah terdapat surat persetujuan Penjualan BMN Pada Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4143/PSDKP.1/PL.750/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Facsimile	1	1.750.000
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	18.573.575
3	P.C Unit	4	31.253.600
Total			51.577.175

Nomor B.5010/PSDKP.1/PL.750/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-83	-197936765
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-3	-9627000
3	Camera Electronic	-3	-14350000
4	Gordyin/Kray	-12	-129918895
5	Meja Makan Besi	-1	-2200000
6	Meja Telepon	-1	-518000
7	Facsimile	-7	-12765000
8	Hard Disk	-2	-7690000
9	Pompa Air	-3	-14585000
10	Perkakas Kantor Lainnya	-1	-5000000
11	Local Area Network (LAN)	-1	-8490000
12	Lemari Penyimpan	-4	-2881000
13	Unit Tranceiver VHF Portable	-2	-12672000
14	Perkakas	-1	-7000000
15	LCD Projector/Infocus	-4	-38875000
16	Meja Kerja Kayu	-52	-123693000
17	Mesin Absensi	-1	-7720000
18	Treadmill	-2	-19000000
19	A.C. Split	-29	-121216000
20	Mesin Barcode	-1	-3870000
21	Pompa Lainnya	-2	-4700000
22	Tangga Aluminium	-2	-4362000
23	Loudspeaker	-2	-10010000
24	Meja Komputer	-10	-7255000
25	LCD Monitor	-1	-7280000
26	Karpet	-2	-21625000
27	Teropong (Optik)	-3	-11572000
28	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	-4	-16940000
29	Kitchen Set	-5	-18450000
30	Kompur Listrik (Alat Dapur)	-2	-17050000
31	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-3	-6320000



32	Handy Talky (HT)	-6	-6646000
33	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	-7	-14330000
34	Teropong/Keker	-10	-19045000
35	Camera Digital	-27	-115713550
36	Bracket Standing Peralatan	-1	-3100000
37	Alat Penghancur Kertas	-1	-7394000
38	Mesin Pengereng Pakaian	-2	-9768000
39	Visual Approach Slope Indicator (VASI) Lainnya	-1	-1663000
40	Sound System	-3	-154550000
41	Peralatan Antena Penerima UHF	-1	-900000
42	Kursi Besi/Metal	-53	-57085000
43	Kursi Besi/Metal	-8	-1480000
44	Dispenser	-18	-36983000
45	Camera Under Water	-3	-28743000
46	Pesawat Telephone	-7	-6672000
47	Meja Kerja Besi/Metal	-13	-24037100
48	Mesin Cuci	-10	-38399000
49	Unit Tranceiver Ssb Stationery	-4	-87868000
50	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	-7	-26340000
51	Wireless	-1	-5850000
52	Alat Selam Seet	-4	-72800000
53	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-3	-14440000
54	Sirine	-1	-4000000
55	Note Book	-3	-43897400
56	DVD Player	-1	-2475000
57	Televisi	-16	-88632000
58	Internal Door Charge Satchels (Breachers Satchels)	-4	-1400000
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-19	-74394510
60	Lap Top	-44	-439359860
61	Stabilisator	-1	-10450000
62	Alat Dapur Lainnya	-2	-30280000
63	Kompor Gas (Alat Dapur)	-1	-1000000
64	Meubelair Lainnya	-1	-12750000
65	Jet Pump	-1	-8500000
66	Film Projector	-1	-30000000
67	Mesin Pemotong Rumput	-1	-4000000
68	Lemari Es	-9	-35330000
69	Bendera Start	-1	-4750000
70	P.C Unit	-78	-638990884
71	Unit Power Supply	-10	-24375000
72	Tablet PC	-13	-89949600
73	Finger Printer Time and Attandance	-16	-52536000

	Acces Control System		
74	Home Theater	-1	-1100000
75	Water Jet Ejector	-1	-5940000
76	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-1	-1500000
77	Meja Resepsionis	-1	-2500000
78	Audio Mixing Console	-1	-8450000
79	Megaphone	-2	-2737000
80	Komputer Jaringan Lainnya	-2	-93650000
	Meja Ketik	-2	-590000
	Total	673	3.322.815.56 4

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp3.371.249
.739*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.371.249.739,00** dan **Rp0**. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	3.371.249.739	3.371.249.739	-
Jumlah	3.371.249.739	3.371.249.739	-

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00** Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga

Kepada Pihak Ketiga Rp674.795.530,00 Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp674.795.530,00** dan **Rp39.203.852,00** Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar antara lain :

- Beban langganan Listrik bulan Desember 2024 senilai Rp 24.305.865,00
- Beban Langganan Internet bulan Desember 2024 senilai Rp 10.463.980,00
- BBM sesuai BAST/BAPP Nomor B.7352/PSDKPLan.5/PW.380/XII/2024 Tanggal 30-12-2024 Rp207.376.000,00
- Pembayaran PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SDKP MOROWALI sesuai BAST/BAPP Nomor B.7304/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27-12-2024 Rp372.995.100,00
- Pembayaran PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SDKP MOROWALI sesuai BAST/BAPP Nomor B.7308/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27-12-2024 Rp39.100.000,00
- Kekurangan Gaji Maret 2024 - Desember 2024 untuk 8 Pegawai Rp7.087.100,00
- Kekurangan Pembulatan Gaji Maret 2024 - Desember 2024 untuk 5 Pegawai Rp654,00
- Kekurangan Tunjangan Suami / Istri Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 7 Pegawai Rp625.410,00
- Kekurangan Tunjangan Anak Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 7 Pegawai Rp159.960,00
- Kekurangan Tunjangan PPh PNS Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 2 Pegawai Rp89.163,00
- Kekurangan Tunjangan Beras Bulan Desember 2024 untuk 1 Pegawai Rp217.260,00
- Kekurangan Tunjangan Umum Bulan Desember 2024 untuk 1 Pegawai Rp180.000,00
- Kekurangan Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan November - Desember 2024 untuk 4 pegawai Rp12.195.038,00

Utang Yang C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

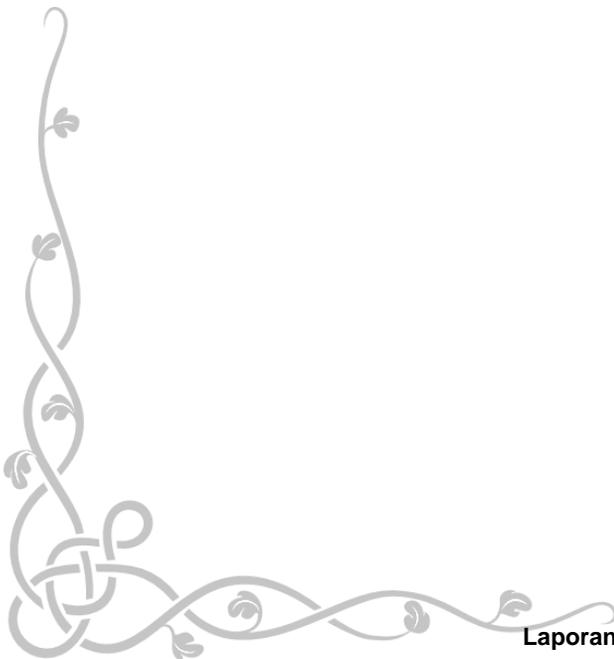
Belum Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-
Ditagihkan masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan
Rp0 kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jangka Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing
Pendek masing sebesar **Rp0 dan Rp0**. Rincian lebih lanjut tentang Utang Jangka
Lainnya Rp0 Pendek Lainnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas C.28 Ekuitas

Rp105.739.2 Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masingsebesar
55.506 **Rp105.739.255.506,00** dan **Rp104.553.035.267,00** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp24.270.57
3

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp24.270.573,00** dan **Rp0,00** Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp -	Rp -	-
Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	Rp 24.270.573	Rp -	100%
Pendapatan jasa giro	Rp -	Rp -	-
Pendapatan denda pelaksanaan rekening Penerimaan bersaldo nihil dalam rangka TSA	Rp -	Rp -	-
Jumlah	24.270.573	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 yaitu Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali senilai Rp.24.270.573,00. Pembayaran denda dilakukan dengan pemotongan langsung di SPM Pembayaran RPATA No. 00007T/440822/2025 tanggal 06 Januari 2025, dengan SP2D nomor 259991301003019 tanggal 10 Januari 2025.

D.2 Beban Pegawai

Beban
Pegawai
Rp15.838.23
5.004

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.838.235.004,00** dan **Rp13.520.102.115,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %)
Beban Gaji	6.085.809.490	5.076.697.775	20
Beban Tunjangan	1.424.606.904	1.257.769.711	13
Beban Uang Makan	630.506.000	637.922.600	-1
Beban Uang Lembur	0,	385.584.000,	-100
Beban Tunjangan Kinerja	7.697.312.610,	5.916.237.029,	30
Beban Tunjangan Kinerja PPPK	0,	245.891.000,	-100
Jumlah Beban Pegawai (LO)	15.838.235.004	13.520.102.115	17

Beban D.3 Beban Persediaan

*Persediaan
Rp524.725.2
45,00*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp524.752.245,00** dan **Rp773.006.126,00** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	524.725.245	773.006.126	(32)
Beban Persediaan Lainnya		0	
Jumlah Beban Persediaan	524.725.245	773.006.126	(32)

Berdasarkan BA Opname Fisik Persediaan nomor B.7390/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI
117111	BARANG KONSUMSI			
1.01.03.01.001	Alat Tulis	187	Buah	1.121.935
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	7	Buah	98.000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	66	Pack	1.612.150
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	36	Buah	188.990
1.01.03.01.005	Buku Tulis	13	Buah	691.000
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	167	Buah	5.722.730
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	Buah	499.540
1.01.03.01.010	Alat Perekat	109	Buah	2.675.600
1.01.03.01.012	Staples	14	Buah	1.112.500
1.01.03.01.013	Isi Staples	56	Pack	1.074.600
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	32	Buah	1.708.100
1.01.03.02.001	Kertas HVS	373	Rim	29.974.410
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	244	Buah	1.299.300
1.01.03.02.003	Kertas Cover	19	Rim	1.553.000
1.01.03.02.004	Amplop	520	Pack	3.810.050
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	18	Pack	471.600
1.01.03.03.002	Tinta Cetak	140	Buah	1.841.600
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	261	Buah	64.937.647
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya	19	Buah	700.000
1010309001	Meterai	114	Buah	4.430.000
1.01.03.99.999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229	Buah	120.000
JUMLAH BARANG KONSUMSI		2.648		125.642.752
117114	SUKU CADANG			
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	17	Buah	230.791.205
JUMLAH SUKU CADANG		17		230.791.205
TOTAL		2.665		356.433.957

Beban D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa
Rp15.914.78
0.336

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.914.780.336,00** dan **Rp18.502.046.387,00** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	2.151.349.242	2.250.472.235	(4)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	248.710.300	250.754.960	(1)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.557.080	9.398.600	(52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98.952.000	185.520.000	(47)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	239.434.000	(100)
Beban Bahan	9.624.321.703	12.624.080.309	(24)
Beban Beban Honor Output Kegiatan	213.660.000	163.190.000	31
Beban Honor Non Operasional Lainnya	1.775.761.195	1.535.103.369	16
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	30.900.034	7.680.000	302
Beban Langganan Listrik	659.698.787	467.085.049	41
Beban Langganan Telepon	219.250.750	226.954.153	(3)
Beban Langganan Air	54.958.329	57.236.050	(4)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12.556.200	13.022.662	(4)
Beban Sewa	203.322.000	97.679.000	108
Beban Jasa Profesi	38.200.000	51.204.000	(25)
Beban Jasa Lainnya	578.582.716	323.232.000	79
Jumlah	15.914.780.336	18.502.046.387	(14)

Beban D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp5.506.342
.365

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp5.506.342.365,00** dan **Rp3.358.604.876,00** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	839.839.000	839.839.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.837.183.302	1.982.817.829	94
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	-
Beban Persediaan suku cadang	689.704.163	535.948.047	29
Jumlah	5.366.726.465	3.358.604.876	60

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp6.568.668
.436*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp6.568.668.436,00** dan **Rp4.447.212.693,00** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.045.473.197	3.151.575.091	60
Beban Perjalanan Tetap	186.054.148	189.404.334	(2)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.897.261	84.580.000	78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	61.500.000	130.000.000	(53)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.124.743.830	891.653.268	26
Jumlah	6.568.668.436	4.447.212.693	48

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp4.556.277
.683*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.556.277.683,00** dan **Rp4.295.143.739,00** Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN)
BebanBeban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.477.122.613	2.172.682.052	14,012
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	845.453.610	788.304.736	7,250
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	741.655.730	748.810.516	-0,955
Beban Penyusutan Irigasi	434.692.441	531.210.408	-18,169
Beban Penyusutan jaringan	57.353.289	54.136.027	5,943
Jumlah Penyusutan	4.556.277.683	4.295.143.739	6,080
Beban Amortisasi Aplikasi	0	0	0,000
Jumlah Amortisasi	0	0	0,000

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp132.323,0
0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode 31 Desember 2024 dan 2023 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah masing-masing sebesar Rp.132.323,00 dan Rp.9.225,00.

*Surplus/(Def
isit) Kegiatan
Non
Operasional
Rp802.537*

D.11 Surplus/(Defisit) kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp802.537,00 dan Rp32.212.887,00 yang berasal dari Pendapatan Kegiatan Non operasional lainnya.

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	802.537	32.212.887	(97,51)
Beban dari Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	802.537	32.212.887	

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional terdiri dari:

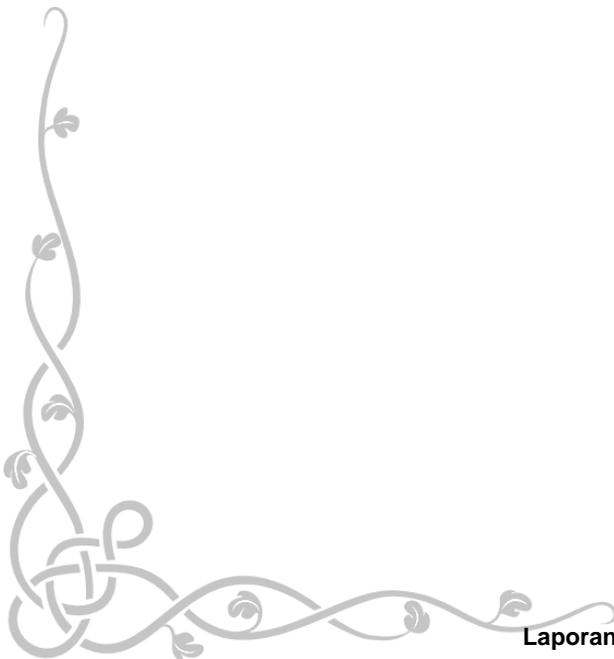
- Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp.802.537,- dengan rincian :

No	Keterangan	Nilai	No. NTPN	Tanggal
1	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 unit Sepeda Motor (Risalah Lelang No.109/15.05/2024-01 tgl 21 Maret 2024)	Rp445.000	E8F8E61QV30QR96B	22/03/24
2	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 paket Scrap perahu karet & CCTV (Risalah Lelang No. 90/16.01/2024-1 tgl 08 Maret 2024)	Rp99.960	1957061qv30J1L2V	03/03/24
3	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 paket inventaris kantor (Risalah Lelang no. 2065/15.02/2024-01 tgl 09 Desember 2024)	Rp257.577	A72283CIFKS3QKMD	09/12/24
Total		Rp.802.537,-		

Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa periode per 31 Desember 2024 pada Pangkalan PSDKP Bitung.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp104.553.0
35.267

Nilai ekuitas pada tanggal per 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp104.553.035.267,00** dan **Rp100.797.282.834,00**

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/(Defi
sit) LO
(Rp48.884.08
8.282)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing defisit sebesar **(Rp48.884.088.282,00)** dan **(Rp44.863.912.274,00)**. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Aset
Reklasifikasi
Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Reklasifikasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp191.293.941,00**

Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non
Revaluasi
(Rp3.492.064
,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp3.492.064) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan kode NUP dan kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk belanja barang ekstrakomtable dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	No.Surat Koreksi	Nilai
1	Saldo Awal Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen	B.7392/PSDKPLan.5/P L.760/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024	Rp 103.371.450
2	Saldo Awal Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen		Rp (344.571.500)
3	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen		Rp 344.571.500
4	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen		Rp (53.969.032)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Kamera Udara	B.7355/PSDKPLan.5/ KP.120/ XII/2024 tanggal 30 Desember 2024	Rp (697.434)
6	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Camera Digital		Rp 319.380
7	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Camera Digital		Rp (532.300)
8	Koreksi Pencatatan Aset Semi Permanen dari Akun Belanja Barang ke Belanja Modal	Memo Jurnal No.023 tgl 31 Desember 2024	Rp (45.000.000)
TOTAL			Rp 3.492.064

Koreksi Lain-lain E.3.6 *Koreksi Lain-lain* *Rp9.225*

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp9.225 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Nilai tersebut merupakan pajak 0,5% dari nilai tunjangan yang belum dibayarkan. Nilai piutang tidak tertagih sebesar Rp9.225,- yang diperoleh dari piutang tunjangan Umum tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp1.845.000.

E.3.7 *Koreksi Atas Beban*

Koreksi Atas Beban Rp0

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.8 Koreksi Atas Pendapatan

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp50.073.791.360
1.360*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp50.073.791.360,00** dan **Rp48.428.370.766,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024	2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	50.075.199.397,	48.467.925.444,
Diterima dari Entitas Lain	-2.832.537,	-32.212.887,
Transfer Keluar	0,	-12.561.791,
Transfer Masuk	1.424.500,	5.220.000,
	50.073.791.360,	48.428.370.766,

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 dan 2023, DDEL sebesar (Rp2.832.537) dan (Rp32.212.887), sedangkan DKEL sebesar Rp50.075.199.397 dan Rp48.467.925.444.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan

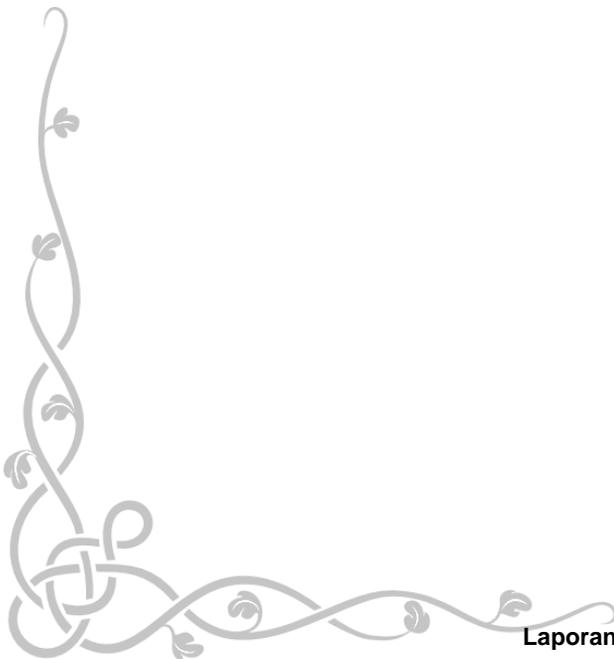
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0,- dan (Rp.12.561.791). Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.424.500 dan Rp5.220.000. Transfer masuk tersebut diperoleh dari Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST nomor B.1690/PSDKPSta.6/PL.930/X/2024 berupa Laptop Merk Acer sejumlah 1 unit NUP 3 senilai Rp.11.396.000.

Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang tercantum ke dalam LO sebesar Rp1.424.500, hal tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp9.971.500.

Ekuitas Akhir
Rp105.739.25
5.506

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp105.739.255.506,00** dan **Rp104.553.035.267,00**



F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

REVISI DIPA :

Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan semester dua telah melaksanakan revisi sebanyak 14 kali terdiri dari :

➤ **Pagu Awal**

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 55.883.290.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2024 dengan kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023.

Revisi ke 01

Kegiatan revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan cara revisi pergeseran anggaran, penambahan akun dalam 1 (satu) RO dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasi kegiatan (POK) sesuai surat usulanrevisi anggaran nomor B.224/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak mengubah kode DS dari kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023 menjadi kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024.

Revisi ke 02

Revisi anggaran *Automatic Adjustment* dalam catatan halaman IVA DIPA dan buka blokir penghapusan tanda blokir dalam halaman IV DIPA. Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran adalah arahan presiden RI dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dipandang perlu dilakukan *Automatic Adjustment* Ditjen PSDKP sebesar Rp 83.004.572.000 dan mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja pada satker lingkup Ditjen PSDKP dengan buka blokir sebesar Rp 2.737.159.000. Sesuai surat usulan revisi nomor B.48/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 23 Januari 2024. Revisi ini tidak



mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024 menjadi DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024.

Revisi ke 03

Revisi anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran antar RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi anggaran adalah untuk memenuhi pengadaan perangkat pengolah data dalam rangka mendukung kegiatan dukungan manajerial pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 sesuai surat usulan revisi nomor B.643/PSDKPLan.5/RC.420/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024 menjadi DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 21 Februari 2024.

Revisi ke 04

Revisi pagu anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi sesuai surat usulan revisi anggaran B.1604/PSDKPLan.5/RC.420/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dilakukan dalam rangka pemenuhan kegiatan POKMASWAS dan dukungan manajerial tanpa mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini tidak mengubah kode DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 24 April 2024.

Revisi ke 05

Revisi anggaran dalam hal pagu berubah dengan cara pergeseran anggaran antar satker pada RO PN, revisi administratif pembukaan blokir, dan revisi tukar *Automatic Adjustment* sesuai surat usulan revisi anggaran B.874/PSDKPLan.5/RC.420/III/2024 tanggal 4 Maret 2024. Pertimbangan dilakukannya revisi adalah:

- Buka Blokir blokir administratif (kode 2) pada RO 2355.EBA.994. Layanan Perkantoran (002 Operasional Perkantoran) sebesar Rp132.220.000 dikarenakan pemeliharaan yang dianggarkan belum tercantum pada RKBMN Tahun 2024 dialihkan menjadi pemeliharaan



bangunan pada Satwas dan Wilker SDKP serta pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;

- Pergeseran anggaran antar Sakter Ditjen PSDKP pada RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sebesar Rp1.338.100.000 semula Rp5.472.162.000 menjadi Rp3.909.422.000 untuk mendukung penyelesaian kantor Stasiun PSDKP Belawan;
- Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun yang mengakibatkan penambahan volume output semula 4 (empat) Unit menjadi 5 (lima) Unit, yaitu Renovasi Mess Perwira; dan
- Tukar *Automatic Adjustment* pada RO 2350.QHD.001. Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp213.444.000 sebelumnya pada kegiatan bahan bakar minyak URC dialihkan ke bahan bakar minyak Hiu 05. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 3572-1708-5437-4088 tanggal 24 April 2024 menjadi DS:9526-0813-8772-5203 tanggal 1 Mei 2024.

Revisi ke 06

Revisi pagu anggaran tetap dengan cara Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) RO, pergeseran anggaran antar KRO, Perubahan RPD Halaman III DIPA, dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasional Kegiatan. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah pemenuhan alokasi anggaran penyambungan instalasi listrik darat kapal pengawas dan pengadaan perlengkapan prediktif speed boat/ rigid inflatable boat/ rubber boat; pelaksanaan Koordinasi Forum TPKP; serta pemutakhiran POK terhadap perubahan detail belanja modal peralatan dan mesin semula pengadaan fasilitas perkantoran (meubelair) menjadi pengadaan sarana operasional pengawasan (kendaraan dinas) dalam rangka mendukung kegiatan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS:9526-0813-8772-5203 tanggal 1 Mei 2024 menjadi DS:2717-5027-9385-6488 tanggal 31 Mei 2024.

Revisi ke 07

Revisi anggaran dalam hal pagu berubah. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan pengurangan alokasi pada RO PN. Revisi dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung pada kegiatan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Morowali dan Renovasi Kantor dan Ruang Pelayanan Pos Pengawasan Satwas SDKP Kendari diusulkan pengurangan alokasi anggaran pada RO 2350.RBQ.001. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sebesar Rp1.238.100.000 semula Rp5.472.162.000 menjadi Rp4.234.062.000. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 2717-5027-9385-6488 tanggal 31 Mei 2024 menjadi DS:3000-6750-4055-5336.

Revisi ke 08

Revisi anggaran dalam hal pagu tetap. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD Halaman III DIPA. Revisi dibutuhkan untuk memenuhi alokasi anggaran pembangunan prasarana pengawasan SDKP renovasi pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung dan renovasi bangunan operator Pangkalan PSDKP Bitung serta kegiatan dukungan manajerial dalam rangka mendukung kegiatan tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS tetap, yaitu: 3000-6750- 4055-5336 tanggal 15 Juli 2024.

Revisi ke 09

Revisi anggaran dalam hal pagu tetap. Pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran anggaran antar KRO, penambahan volume output, dan perubahan RPD halaman III DIPA. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah:

- Pemenuhan alokasi anggaran pengadaan meubelair kantor dan ruang pelayanan publik Pangkalan PSDKP Bitung yang bersumber dari pembangunan pos pengawasan SDKP Kalamo Gorontalo pada RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun;
- Pembayaran kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang

dikenakan sanksi pidana pada 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana dengan pemenuhan yang bersumber dari RO 2351.BCE.003 perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif;

- Belanja modal peralatan dan mesin (532111) pengadaan laptop pemetaan ruang laut di wilayah pesisir untuk mendukung olah data informasi geografis ataupun analisis spasial pengawasan ruang laut dan wilayah pesisir dengan pemenuhan yang bersumber dari belanja barang dan belanja perjalanan dinas pada RO 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya;
- Belanja peralatan dinas biasa luar negeri (524211) untuk menghadiri undangan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* pada RO 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya; dan
- Dukungan kegiatan manajerial bersumber dari pergeseran antar KRO pada kegiatan 2355 Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP. Revisi ini mengakibatkan penambahan volume RO 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana semula 7 (tujuh) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 3000-6750-4055-5336 tanggal 15 Juli 2024 menjadi DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 23 September 2024.

Revisi ke 10

Revisi pagu anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran dalam satu RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Tujuan revisi adalah untuk pemenuhan alokasi anggaran perawatan darurat speedboat penggantian colladr URC Hiu Biru 05 dan dukungan kegiatan teknis, manajerial serta operasional perkantoran pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 dan revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini tidak mengubah kode DS yaitu DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 15 Oktober 2024.

Revisi ke 11

Pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup KKP dalam rangka pemenuhan belanja pegawai, rekomposisi *automatic adjustment* (AA) antar unit eselon I lingkup KKP, tukar AA Pangkalan PSDKP Jakarta, pergeseran anggaran antar RO PN Stasiun PSDKP Kupang, dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan sebelas satker UPT.

Alasan perlunya dilakukan revisi anggaran adalah:

- Pemenuhan belanja pegawai (001) satker Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp1.055.048.000 dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran belanja pegawai antar Eselon I dalam rangka pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan kinerja;
- Rekomposisi *Automatic Adjustment* (AA) antar Unit Eselon I lingkup KKP sebesar Rp40.421.421.000 dalam rangka pemenuhan hari operasi kapal pengawas sebesar Rp35.067.901.000, Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebesar Rp4.785.520.000, Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif sebesar Rp568.000.000.
- Tukar *Automatic Adjustment* (AA) Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp216.720.000 dalam rangka perbaikan Kapal Pengawas Hiu 06;
- Pergeseran anggaran antar RO Prioritas Nasional (PN) satker Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp70.180.000 dalam rangka pemenuhan hari operasi kapal pengawas;
- Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker yang mengusulkan revisi anggaran. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6219-9639-0838-7955 tanggal 15 Oktober 2024 menjadi DS 1128-0560-7798-2740 tanggal 5 November 2024.

Revisi ke 12

Revisi administrasi dengan cara pencantuman catatan halaman IV A DIPA (blokir). Hal ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 dan melakukan pembatasan

belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam halaman IV A DIPA sebagai penghematan. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 1128-0560-7798-2740 tanggal 5 November 2024 menjadi DS: 6260-6258-7229-6505 tanggal 18 November 2024.

Revisi ke 13

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan antar satker UPT lingkup Ditjen PSDKP. Pergeseran anggaran belanja pegawai

(001) antar satker pada kekurangan belanja pegawai Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Bitung memiliki kekurangan belanja pegawai sebesar Rp757.000.000.

Pergeseran antar KRO non PN Pangkalan PSDKP Bitung berupa pergeseran anggaran ke 2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal sebesar Rp251.000, 2355.EBA.962. Layanan Umum sebesar Rp105.127.000 dan 2355.EBA.958.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar Rp1.442.000 yang bersumber dari 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp251.000, 2355.EBA.956. Layanan BMN sebesar Rp746.000, 2355.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebesar Rp16.800.000, 2355.EBA.963. Layanan Data dan Informasi sebesar Rp8.000.000, 2355.EBB.951. Layanan Sarana Internal sebesar Rp29.000, 2355.EBC.954. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp44.349.000, 2355.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp18.182.000, 2355.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp4.807.000, 2355.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp3.982.000, 2355.EBD.961.Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp8.674.000, 2355.EBD.974.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar Rp1.000.000.

Pergeseran antar jenis belanja Pangkalan PSDKP Bitung berupa belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sejumlah Rp36.750.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas sejumlah Rp80.000.000,

dan belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun sejumlah Rp6.000.000.

Perubahan volume output pada RO non PN Pangkalan PSDKP Bitung pada 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi semula 8 menjadi 9

unit. 2355.EBA.956 Layanan BMN semula 1 menjadi 4 layanan. Penambahan volume output Pangkalan PSDKP Bitung dengan volume sebanyak 5 perkara dan anggaran sebesar Rp340.000.000. Revisi ini mengubah kode DS yaitu 6260-6258-7229-6505 tanggal 18 November 2024 menjadi DS: 4201-0395-2056-6803 tanggal 11 Desember 2024.

Revisi ke 14

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK_ dengan cara pergeseran anggaran dalam satu RO, perubahan akun beserta alokasinya dalam satu RO dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasi Kegiatan (POK). Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan teknis dan sukungan manajerial di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS: 4201-0395-2056-6803 tanggal 17 Desember 2024.

Proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

JAMINAN PEMELIHARAAN

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat jaminan pemeliharaan yaitu:

- Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan nomor 0034324120028348 yang berlaku selama 180 hari kalender dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Juni 2025 atas pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung oleh CV. Mitratama Nusantara dengan nilai jaminan sebesar Rp79.750.000.
- Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan nomor 0021824120029350 yang berlaku selama 180 hari kalender dari tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 24 Juni 2025 atas pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung oleh CV. Adika Dipamadatu Konstruksi dengan nilai jaminan sebesar Rp44.945.505.

PENCATATAN PIUTANG YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat piutang yang pencatatannya akan dilakukan pada Rekon Laporan Keuangan Semester I TA 2025, antara lain :

1. Pendapatan Sewa Rumah Negara TA 2024 sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp.10.178.760,-

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar antara lain :

- Beban langganan Listrik bulan Desember 2024 senilai Rp 24.305.865,00
- Beban Langganan Internet bulan Desember 2024 senilai Rp 10.463.980,00
- BBM sesuai BAST/BAPP Nomor B.7352/PSDKPLan.5/PW.380/XII/2024 Tanggal 30-12-2024 Rp207.376.000,00
- Pembayaran PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SDKP MOROWALI sesuai BAST/BAPP Nomor B.7304/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27-12-2024 Rp372.995.100,00
- Pembayaran PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SDKP MOROWALI sesuai BAST/BAPP Nomor B.7308/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2024 Tanggal 27-12-2024 Rp39.100.000,00
- Kekurangan Gaji Maret 2024 - Desember 2024 untuk 8 Pegawai Rp7.087.100,00
- Kekurangan Pembulatan Gaji Maret 2024 - Desember 2024 untuk 5 Pegawai Rp654,00
- Kekurangan Tunjangan Suami / Istri Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 7 Pegawai Rp625.410,00
- Kekurangan Tunjangan Anak Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 7 Pegawai Rp159.960,00
- Kekurangan Tunjangan PPh PNS Bulan Maret 2024 - Desember 2024 untuk 2 Pegawai Rp89.163,00
- Kekurangan Tunjangan Beras Bulan Desember 2024 untuk 1 Pegawai Rp217.260,00
- Kekurangan Tunjangan Umum Bulan Desember 2024 untuk 1 Pegawai Rp180.000,00
- Kekurangan Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan November - Desember 2024 untuk 4 pegawai Rp12.195.038,00

Terdapat pengembalian belanja barang pada tahun 2024 senilai Rp13.318.640, rinciannya:

- Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Perjalanan dinas SPM 354 NTPN E5E731GCAH8KQ9F3 An. Sutrisno Kumaat Rp 7.200.095,00
- Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Perjalanan dinas SPM 354 NTPN A59E65UFPM4IR9ET An. Maria Indera Rosari Rp 6.118.545,00

KDP periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	No.SP2D	Nilai	Tanggal
Perolehan/Penambahan KDP				
1	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal (Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali)	241790301000194	44.480.000	03-06-2024
2	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal (Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung)	241790301000194	76.720.000	03-06-2024
Sub Total			155.200.000	
Pengembangan KDP				
3	Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan Sdkp Morowali	241791301005234	242.730.000	14-08-2024
4	Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan Pskdp Bitung	241791301005236	435.000.000	15-08-2024
5	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Perencanaan Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	241790301000461	17.080.000	14-10-2024
6	Pertanggungjawaban	241790301000461	16.920.000	14-10-2024



	Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Perencanaan Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung			
7	Uang Muka Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	241791302003751	59.955.000	23-10-2024
8	Uang Muka Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	241791302003674	59.835.000	16-10-2024
9	Termin 1 Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung)	241791301006698	507.500.000	15-10-2024
10	Termin 1 Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan Sdkp Morowali	241791301007342	283.185.000	13-11-2024
11	Konstruksi Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	241791302004304	139.895.000	29-11-2024
12	Konstruksi Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	241791302004351	139.615.000	2-12-2024
13	Pengawasan Konstruksi Renovasi Bangunan Operator A Pangkalan PSDKP Bitung	241791302004691	13.042.500	12-12-2024
14	Pengawasan Konstruksi Renovasi Bangunan Operator B Pangkalan PSDKP Bitung	241791302004689	12.398.700	12-12-2024
15	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan Pskdp Bitung	241791301008629	652.500.000	24-12-2024
16	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan Pskdp Bitung	241791302004990	70.200.000	24-12-2024
17	Termin 2 Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung)	241790301000666	372.995.100	27-12-2024
18	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos Pengawasan Sdkp Morowali	241790301000667	39.100.000	27-12-2024
19	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal (20% perencanaan)	241790301000762	39.520.000	31-12-2024
20	Pertanggungjawaban	241790301000767	35.000.000	31-12-2024

	Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal ongkos kirim bahan pos kapoposan			
	Sub Total		3.102.471.300	
Perolehan Lainnya KDP				
21	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang belanja bahan baku pos di kapoposan	241790301000475	45.000.000	18-10-2024
	Sub Total		45.000.000	
	TOTAL		3.302.671.300	

Tindak Lanjut Temuan BPK atas Belanja Pegawai Tugas Belajar

Sesuai dengan surat Dirjen No. T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 tgl 05 April 2024 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar, telah dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian Tunjangan Umum Pegawai Tugas Belajar sebanyak 3 pegawai, dengan rincian sebagai berikut.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TA 2024 senilai Rp.370.000,- an Chris Berry Sinambela tanggal 29 April 2024 dengan NTPN 344AF0JUQKTTN3QA dan NTB 240429010251
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TA 2024 senilai Rp.185.000,- an Moch. Anwar tanggal 25 April 2024 dengan NTPN 1DAE745KPV6S8E5C dan NTB 000000214532
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum senilai Rp.2.585.000,- an Semoel Siruru dengan rincian Tunjangan Umum TA 2023 senilai Rp.1.845.000,- dan Tunjangan Umum TA 2024 senilai Rp.740.000,-. Pengembalian Tunjangan umum TA 2023 disetorkan tanggal 08 Mei 2024 dengan NTPN E9A601JNFV2F20JJ dan NTB 240508316819. Sementara Pengembalian Tunjangan Umum TA 2024 disetorkan tanggal 08 Mei 2024 dengan NTPN 0F7706QT9FNC6AHI dan NTB 240508316980.

Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN. antara lain:

- a. Tanah di Belang telah keluar SK PSP 180/KM.6/KNL.1601/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dan saat ini dalam proses persertifikatan di BPN.



- b. Telah terdapat permohonan pinjam pakai berupa tanah milik DKP Prov. Sulawesi utara nomor B.4713/PSDKP.1/PL.720/XI/2024 tanggal 18 November 2024
- c. terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN dikarenakan terdapat belanja 532111 - Belanja Peralatan dan Mesin berupa pengadaan peralatan dan mesin Kehumasan namun nilainya di bawah kapitalisasi (nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin Rp1.000.000) yang seharusnya memakai belanja 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	NUP	Nilai
1	Tas Kamera	1	1	697.434
2	Lampu Blitz Kamera	1	2	532.300
	Total	2		1.229.734

Tindak Lanjut hasil temuan BPK

10b/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Pangkalan PSDKP Bitung terdapat beberapa temuan antara lain :

- a. Aset Tetap Tanah. Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang dicatat dalam Aplikasi SIMAN belum didukung dengan bukti Kepemilikan yang sah. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Pembangunan Kapal. BPKB dan STNK. Namun masih terdapat aset yang dalam tindaklanjut berupa :
- i. Tanah yang ada di Belang dan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut (Bangkeplut) dalam proses pengurusan ke BPN
 - ii. Sertifikat Pembangunan Kapal untuk Speedboat Dolphin 003. Dolphin 19 dan Dolphin 26 masih dalam koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat POA
 - iii. Bangunan sebanyak 42 NUP yang masih memerlukan PBG/IMB dalam proses pengurusan ke PTSP

Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah.

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga. langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

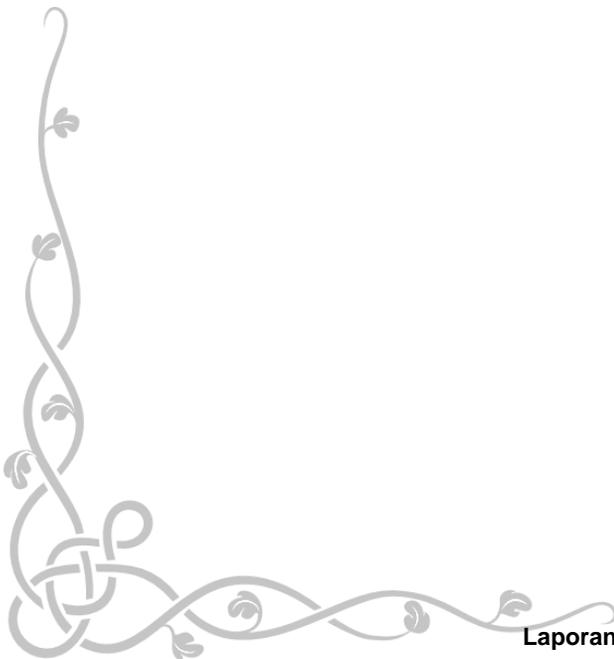
- a. Untuk aset yang belum dilakukan PSP telah diusulkan permohonan PSP ke KPPL Manado.
- b. Terhadap aset yang kondisi rusak berat telah diusulkan penghapusan aset ke KPPL Manado.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

• Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor .. perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan, temuan dari Pemeriksaan BPK terhadap Pangkalan PSDKP Bitung adalah Terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp.2.193.975,00 an Wayudhi Rebo. Terhadap konsep temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa :

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2024 an Wayudhi Rebo senilai Rp.2.193.975,00. Setoran pengembalian dilakukan tanggal 24 April 2025 dengan NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ dan NTB 250424011442;
- Terhadap setoran tersebut telah dilakukan pencatatan pengakuan Piutang Lainnya (PNBP) senilai Rp.2.193.975,00 dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya senilai Rp.10.970,00.





DAFTAR LAMPIRAN

